

AKREDITASI PONDOK PESANTREN
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta)



Oleh
SUWARDI
NIM: 07913069

T E S I S

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2009

AKREDITASI PONDOK PESANTREN
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta)



Oleh
S U W A R D I
NIM: 07913069

Pembimbing:
Prof. Dr. Usman Abubakar, MA

T E S I S

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA
2009



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 640/PS-MSI/Peng./XI/2009

TESIS berjudul : **AKREDITASI PONDOK PESANTREN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta)**

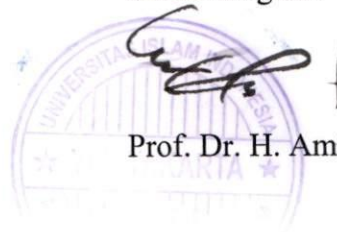
Ditulis oleh : Suwardi

N. I. M. : 07913069

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam

Yogyakarta, 2 Nopember 2009
Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Suwardi
Tempat/tgl.lahir : Kemelak, 28 Desember 1974
N. I. M. : 07913069
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **AKREDITASI PONDOK PESANTREN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta)**

Ketua/Sekretaris: Drs. H. Hajar Dewantara, M.Ag.

(.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H Usman Abu Bakar, MA.

(.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Ahmad Abd Syakur, MA

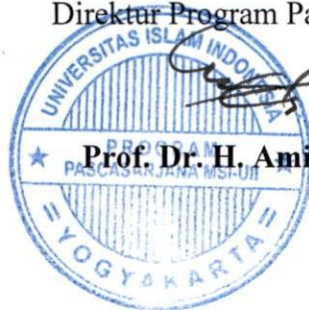
(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2009

Pukul : 08.00–09.00 WIB

Hasil / Nilai : **85,90 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 793/PS-MSI/ND/X/2009

TESIS berjudul : **AKREDITASI PONDOK PESANTREN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta)**

Ditulis oleh : Suwardi

NIM : 07913069

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 22 Oktober 2009

Ketua Program,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : **AKREDITASI PONDOK PESANTREN**
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam
Surakarta)

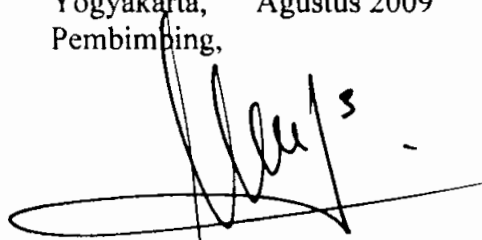
Ditulis oleh : **SUWARDI, S.Ag**

NIM : **0791306**

Konsentrasi : **Pendidikan Islam**

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Agustus 2009
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA

Motto:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُرَدُّونَ اِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (التوبة: 105)



Dan Katakanlah:

"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"

(25. At-Taubah: 105)

INDONESIA

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ (رواه البخارى)

*"Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan,
maka akan difahamkan dalam agama"*

(HR. Bukhary)

Persembahan:



Anakku tersayang

UNIVERSITAS
Yasmin Latufa Wardani & Muhammad Fikrun Najib
ISLAM
Para Mujahid Pendidikan Islam
INDONESIA

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	
ش	syin	sy	
ص	sad	s	s (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	d (dengan titik dibawah)
ط	ta	t	t (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	z (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik keatas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah		apostrof
ي	ya	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap. Contoh

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*.

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh:

جَمَاعَةٌ ditulis *Jamā'ah*.

2. Bila dihidupkan ditulis t. Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *Karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*, contoh: بَيْنَكُمْ *bainakum*,
2. fathah + wawu mati ditulis *au*, contoh: قَوْلٌ *qaul*.

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop (').

أَنْتُمْ *antum*

مُؤَنَّثٌ *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

الْقُرْآنُ *al-Qur'ān*

الْقِيَاسُ *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ *as-Samā*

الشَّمْسُ *asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata perkata, contoh:

ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *zawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

contoh:

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islām*.

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatNya yang tiada terhingga sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan tanpa mengalami hambatan yang berarti. Sholawat serta salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad saw, keluarga serta kepada seluruh ummatnya.

Tesis ini membahas *Akreditasi Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta)*, yang merupakan program pengakuan pemerintah terhadap pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses akreditasi yang dilaksanakan oleh pemerintah di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta. Disamping mendapatkan informasi tentang akreditasi pondok pesantren sebagai bahan acuan pembaharuan sistem manajemen pondok pesantren, mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah baik secara eksternal maupun internal terhadap pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, serta mengkritisi pengaruh yang terjadi pada akreditasi di pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

Dari tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada santri, wali santri, ustadz/dzah, kyai, praktisi pendidikan, pemerintah, pondok-pondok pesantren dan masyarakat luas dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pondok pesantren, khususnya yang meliputi akreditasi dengan penyetaraan

ijazah pondok pesantren setingkat SMP/MTs dan SMU/MA, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan pondok pesantren pada masa selanjutnya.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Drs. H. Fajar Hidayanto, M.M., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Drs. H. Asmuni Mth, MA., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah membimbing dalam penyusunan tesis ini..
6. KH. Naharussurur, BA, selaku pimpinan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.
7. Keluarga Besar Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian terhadap lembaga tersebut.
8. Para Dosen dan Guru Besar yang telah membuka cakrawala pemikiran penulis dalam menyelesaikan program Magister di UII Yogyakarta

9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Studi Islam (S2) UII

Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis.

10. Seluruh staf/karyawan Pascasarjana UII Yogyakarta.

Kekeliruan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam penulisan ini, walaupun hal tersebut sangat tidak diharapkan terjadi oleh penulis. Karenanya saran dan kritik yang konstruktif sangatlah penulis harapkan.

Akhirnya kepada Allah-lah penulis kembalikan kesadaran penuh, mengharap keridlaanNya atas upaya penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 10 Juli 2009

Penulis,



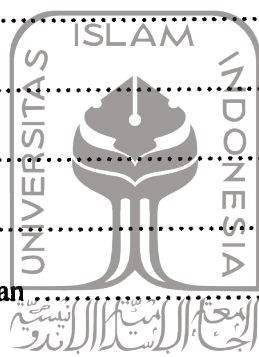
SUWARDI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Tim Penguji Ujian Tesis	iv
Halaman Nota Dinas	v
Halaman Persetujuan Pembimbing	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Pedoman Transliterasi	ix
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xvi
Daftar Tabel	xx
Daftar Gambar	xxi
Daftar Lampiran	xxii
Abstrak (Indonesia)	xxiii
Abstrak (English)	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9

F. Metode penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PROFIL PONDOK PESANTREN TA’MIRUL ISLAM	
SURAKARTA	21
A. Sejarah Singkat Berdiri dan Perkembangan Pondok Pesantren	
Ta’mirul Islam Surakarta	21
1. Sejarah Singkat	21
2. Visi dan Misi	22
3. Motto	23
4. Panca Jiwa	23
B. Pendidikan dan Pengajaran	24
C. Tenaga Pengajar	29
D. Siswa	30
E. Pengakuan-Pengakuan	30
F. Kegiatan-kegiatan	30
G. Pengasuhan Santri	33
BAB III. AKREDITASI PONDOK PESANTREN TA’MIRUL	
ISLAM SURAKARTA	44
A. Pengertian, Tujuan dan Sasaran Akreditasi.....	
1. Pengertian akreditasi	44
2. Tujuan akreditasi	44
3. Sasaran Akreditasi Pondok Pesantren	45
B. Pelaksanaan Akreditasi	46



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

1. Komponen Akreditasi	46
2. Instrumen Akreditasi	47
3. Proses Akreditasi	49
4. Penetapan Status dan SK Akreditasi	53
C. Akreditasi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta	54
BAB IV ANALISIS AKREDITASI PONDOK PESANTREN TA'MIRUL ISLAM SURAKARTA SERTA PENGARUHNYA	56
A. Pengaruh Akreditasi Secara Internal	56
1. Peserta Didik / Santri dan Wali Santri	56
2. Tenaga Pendidik (Ustadz/Ustadzah)	59
3. Kurikulum	63
4. Sarana dan Prasarana	68
5. Administrasi	71
6. Kelembagaan	73
B. Pengaruh Akreditasi Secara Eksternal	76
1. Alumni	76
a. Standar Kelulusan Santri	76
b. Pengabdian masyarakat	78
c. Studi lanjut	79
2. Masyarakat	82
C. Analisis Akreditasi Pondok Pesantren dan Kebijakan Pemerintah .	83
D. Faktor Pendukung dan Penghambat	
1. Faktor Pendukung	85
2. Faktor Penghambat	85

BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR TABEL

NO	URAIAN LAMPIRAN	HAL
1	Tabel 2.1 Kegiatan Harian Santri	40
2	Tabel 2.2 Kegiatan Mingguan Santri	43
3	Tabel 2.3 Kegiatan Tahunan Santri	43
4	Tabel 3.1 Peringkat Akreditasi	53
5	Tabel 4.1 Daftar Jumlah Santri Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta	59
6	Tabel 4.2 Daftar Guru Lulus Sertifikasi KMI Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta	64
7	Tabel 4.3 Data Sarana & Prasarana Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta	71
8	Tabel 4.4 Standar Kelulusan Santri KMI Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta	78
9	Tabel 4.5 Data Kelulusan dan Studi Lanjut Santri	82
10	Tabel 4.6 Daftar Jumlah Santri Baru Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta	84

DAFTAR GAMBAR

NO	URAIAN GAMBAR	HAL
1	Gambar 4.1 Komponen-Komponen Utama Pendidikan	65
2	Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta	76



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

NO	URAIAN LAMPIRAN	HAL
1	Lampiran 1: Interview Guide Sejarah Dan Manajemen Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta	1
2	Lampiran 2 : Interview Guide Akreditasi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta	6
3	Lampiran 3 : Data Jumlah SKS KMI Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta Tahun Pelajaran 2008 / 2009	7
4	Lampiran 4 : SK Mendiknas No. 240/C/KEP/ MN/2003	9
5	Lampiran 5: Surat Dirjendikdasmen No. 2414/C/MN/2004	13
6	Lampiran 6 : Surat Dirjendikdasmen No. 2282/C.C4/MN/2005	14
7	Lampiran 7 : Surat Kedutaan Mesir di Indonesia tertanggal 18 April 2008	17
8	Lampiran 8 : SK Mu'adalah dari Universitas Al-Azhar Mesir Tanggal 31 Maret 2008	18
9	Lampiran 9 : Surat Dirjenpendais Depag RI No. DJ.I/PP.00.7/940/2008	19
10	Lampiran 10 : SK Dirjenpendais Depag RI No. DJ.I/286/2009	22

ABSTRAK
AKREDITASI PONDOK PESANTREN
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta)
Oleh : Suwardi

Tesis ini akan membahas Akreditasi Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta), secara spesifik dan menarik untuk di teliti dalam permasalahan ini adalah bagaimana proses akreditasi pondok pesantren yang digulirkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama mempengaruhi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta baik secara internal maupun eksternal.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh akreditasi pondok pesantren yang dilaksanakan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama terhadap Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta. Sebab Pondok Pesantren Ta'mirul Islam merupakan salah satu pondok pesantren di Jawa Tengah yang terakreditasi dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

Tesis ini menggunakan metode diskriptif analisis guna menggambarkan pengaruh tersebut. Di samping itu juga dibantu dengan sejarah dalam rangka mengumpulkan data-data tentang sejarah Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta dan sistem pendidikannya. Pendekatan sosial dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data pengaruh akreditasi terhadap Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta secara internal dan eksternal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata akreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama terhadap Pondok Pesantren Ta'mirul Islam mempunyai pengaruh baik secara internal maupun eksternal. Pengaruh internalnya antara lain dengan bertambahnya jumlah santri, menguatnya kelembagaan dan kurikulum. Sedangkan pengaruh eksternalnya antara lain dengan kesempatan belajar santri yang telas lulus semakin luas serta tingkat kepercayaan masyarakat yang terus menguat.

Akreditasi yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama ternyata punya pengaruh yang bagus bagi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, serta bagi pondok-pondok pesantren yang lain yang telah di kareditasi. Hendaknya pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama mulai memperhatikan pondok-pondok pesantren lain yang belum terakreditasi, tentunya dengan mekanisme yang sistematis dan komprehensif, mengingat pesantren merupakan pendidikan yang tertua di Indonesia dan telah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata kunci : akreditasi, pondok pesantren

ABSTRACT
ACCREDITATION OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL
(Case study in The Islamic Boarding School of Ta'mirul Islam Surakarta)
By: Suwardi

This analysis of thesis will study about Accreditation of Islamic Boarding School (Case study in The Islamic Boarding School of Ta'mirul Islam Surakarta), is specially and interesting to searched the problem is how the program of accreditation of Islamic Boarding School performance by The National Education and Religion Department influence The Islamic Boarding School of Ta'mirul Islam Surakarta, seen from internal and external factor

This research is aimed to abstain data and information concerning to the influence of accreditation of Islamic Boarding School performance by The National Education and Religion Department influence The Islamic Boarding School of Ta'mirul Islam Surakarta. Because The Islamic Boarding School of Ta'mirul Islam Surakarta is one of Islamic Boarding Schools in Central Java has been accredited by The National Education and Religion Department.

This thesis used method of analysis descriptive to describe these influences. Beside that it is also supported with historic approach to called data about the history of The Islamic Boarding School of Ta'mirul Islam Surakarta. System of education in it and uses survey research to called data of accreditation of Islamic Boarding School influence for The Islamic Boarding School of Ta'mirul Islam Surakarta in internal and external

This research shows that in fact accreditation by The National Education and Religion Department for The Islamic Boarding School of Ta'mirul Islam Surakarta has influence either in internal or external for it self. The internal ones are the students are getting more, the foundation of school and curriculums are stronger. Will the external ones are the opportunity of graduated student are more and the people images are stronger.

Accreditation performed by The National Education and Religion Department in fact has significant influence for the Islamic Boarding School of Ta'mirul Islam Surakarta and anothers ones which have got accredited. The government through, The National Education and Religion Department pay attention to another Islamic Boarding School which have not got accredited certainly with comprehensive and systematic mechanism. Remaining of Islamic Boarding School in the oldest education in Indonesia and it have participate in educating nation.

Key word: *accreditation, Islamic Boarding School*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia (nusantara). Lembaga ini menurut para peneliti sejarah pesantren, telah berdiri sejak abad ke-13 seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia¹. Pada saat itu pondok pesantren telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertama umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa pondok pesantren telah memainkan peranan yang besar dalam usaha memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, membina akhlak mulia, mengembangkan swadaya masyarakat Indonesia serta ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan informal, non formal dan formal yang diselenggarakan. Pesantren secara umum telah dijadikan panutan atau contoh oleh masyarakat dalam segala hal yang dilakukan atau dianjurkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga dengan keberadaannya tersebut semakin menjadikan pesantren di Indonesia sebagai suatu potensi yang sangat besar dalam pengembangan masyarakat.

Di abad ke-21 ini, pesantren ternyata dapat menempatkan status dirinya dengan semakin baik. Pesantren tidak tenggelam oleh zaman yang berubah. Masyarakatpun tidak meminggirkan kaum santri yang dahulu terkenal dengan

¹ Depag RI, *Pedoman Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tahun 2004-2009*, (Jakarta: Dirjen P.K. Pontren dan Bagais RI, 2004), hal. 1.

kekumuhannya, makan apa adanya, sarungan, penyakit, tempatnya anak-anak nakal dan hal-hal lain yang tidak layak di dengar dan dilihat, sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk memasukkan anaknya ke pesantren.

Pesantren dewasa ini terus berbenah, bahkan beberapa pesantren muncul sebagai suatu lembaga yang kelengkapan fasilitas dan manajemennya begitu memadai. Sehingga potensi santri yang ada, tidak hanya dibangun dari segi akhlak, nilai, intelektual dan spiritualnya saja tetapi juga dari segi fisik dan materialnya juga terbangun. Hal ini diwujudkan dengan fasilitas asrama, gedung madrasah, masjid, laboratorium bahasa, laboratorium computer dan internet, laboratorium IPA, bengkel santri dan lain sebagainya yang tertata dengan baik. Dengan fasilitas yang terdapat di pesantren ternyata menjadikan masyarakat lebih tertarik untuk menyekolahkan anaknya. Mereka merasa lebih tenang, karena disamping menerima bekal ilmu agama, pesantren juga membekali santrinya dengan ilmu duniawi sebagai bekal hidup di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dan No. 14 tahun 2005 tentang Sisdiknas, UU No. 14/2005 tentang guru dan dosen, PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP No. 55/2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, Pesantren dan Pendidikan Diniyah telah diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional; sebuah perhatian dan pengakuan yang sudah selayaknya diterima komunitas pesantren. Karena bagaimanapun bentuknya, pendidikan keagamaan dan

pesantren merupakan khazanah budaya Indonesia yang memainkan peran penting dalam proses perubahan sosial sejak awal munculnya lembaga ini.

Diantara sekian banyak ragam pendidikan yang ada di pesantren, terdapat pesantren yang menyelenggarakan jenjang pendidikan 6 tahun seperti layaknya jenjang pendidikan di luar pesantren pada tingkat SMP/MTs dan SMA/MA (khususnya pesantren dengan tipe kedua dan ketiga). Dalam pendidikan formal di SMP/MTs dan SMA/MA kurikulum dan pedoman penyelenggaraannya diatur langsung oleh pemerintah, tetapi di pesantren hal tersebut diatur secara independen oleh pesantren itu sendiri. Terhadap model pendidikan pesantren tersebut oleh pemerintah telah dilakukan akreditasi dan diberi pengakuan dengan disebut sebagai “Pesantren Mu’adalah”, yang artinya pendidikan pesantren yang disetarakan dengan SMP/MTs dan SMA/MA.²

Pesantren yang pertama kali diakreditasi dengan pengakuan mu’adalah / disetarakan / disamakan oleh pemerintah RI melalui Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional adalah pesantren Darussalam Gontor Ponorogo (1998 oleh Depag, 2000 oleh Diknas), kemudian disusul pesantren Al-Amin Preduan (2000), Pesantren Modern Al-Barokah Nganjuk (2002), dan sampai saat ini pesantren yang telah dimu’adalah berjumlah 32³ pesantren se-Indonesia.

² Depag RI, *Pedoman Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru di Pesantren Mu’adalah dalam Jabatan*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2007), hal. iii.

³ Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan Pesantren Mu’adalah, *Panduan Pelaksanaan Sosialisasi, Pemetaan dan Penataan Sertifikasi Guru Pesantren Mu’adalah*, (t.p.: tnp., 2007), lampiran 2 -3.

Akreditasi dengan pengakuan penyeteraan / mu'adalah yang dilakukan oleh pemerintah RI, baik melalui Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional memberikan peluang, perlakuan, dan pengakuan yang sama terhadap ijazah / sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh pesantren mu'adalah. Para alumni pesantren mu'adalah mempunyai hak yang sama dengan alumni sekolah umum untuk dapat terus berkiprah di dunia pendidikan (studi di Perguruan Tinggi Agama dan Umum), dunia kerja dan masyarakat. Mereka tidak akan terhalang hanya karena yang bersangkutan tidak pernah mengenyam pendidikan umum atau memiliki ijazah pendidikan formal dengan mengikuti UN/UNAS (Ujian Nasional).⁴

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, tampaknya cukup menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam mengenai pengaruh akreditasi di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Tegalsari Surakarta, yang merupakan salah satu pesantren yang mendapat pengakuan mu'adalah dari pemerintah pada tahun 2003.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana proses akreditasi dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama) serta pengaruhnya terhadap pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, baik secara internal maupun eksternal?

⁴ SK Dirjen Binbaga Islam, No: E.IV/PP.03.2/KEP/64/98, SK Mendiknas No: 105-106/0/2000, SK Mendiknas No: 096/0/2002, SK Mendiknas No: 240/C/KEP/MN/2003, SK Mendiknas No: 25/C/Kep/MN/2005 tentang penyeteraan KMI/TMI pondok pesantren dengan SMA/MA.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang akreditasi pondok pesantren ini bertujuan:

- a. Mengetahui proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah baik melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.
- b. Mendapatkan informasi tentang akreditasi pondok pesantren sebagai bahan acuan pembaharuan sistem manajemen pondok pesantren.
- c. Mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah baik secara eksternal maupun internal terhadap pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.
- d. Mengkritisi pengaruh yang terjadi pada akreditasi di pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada santri, wali santri, ustadz/dzah, kyai, praktisi pendidikan, pemerintah, pondok-pondok pesantren dan masyarakat luas dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pondok pesantren, khususnya yang meliputi akreditasi dengan penyeteraan ijazah pondok pesantren setingkat SMP/MTs dan SMU/MA.

Disamping itu juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengembangan pondok pesantren pada masa selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pondok pesantren yang dilakukan oleh para sarjana dan praktisi pendidikan telah banyak dilakukan. Biasanya penelitian mereka tidak hanya difokuskan pada pondok pesantren saja, tetapi juga pada madrasah yang merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren.

Masyhud dkk.⁵ dalam bukunya *Manajemen Pondok Pesantren* menulis bahwa pondok pesantren yang lekat dekat figur Kyai (atau Buya di Sumatera Barat, Anjengan di Jawa Barat, dan Tuan Guru di Lombok) seharusnya memiliki manajemen yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tanpa mengabaikan kultur pesantren. Adalah kurang bijaksana dalam melakukan transformasi di pesantren semata-mata hanya berpegangan pada normativitas dengan mengabaikan kondisi obyektif yang terjadi saja. Tetapi membiarkan kondisi itu berjalan terus tanpa ada perubahan juga kurang arif. Maka transformasi di pesantren harus dilakukan dengan toleransi dalam menyikapi kesenjangan itu secara wajar tanpa mengundang konflik.

Maksum Mukhtar⁶ mengemukakan bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran pondok pesantren dengan madrasahnyanya. Maka menurut penulis sudah sewajarnya pondok pesantren yang pada masa orde lama dan orde baru di “anak-tirikan” oleh pemerintah, pada masa sekarang ini mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini tidak

⁵ M. Sulthon Masyhud dkk, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005).

⁶ Maksum Mukhtar, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)

terlepas dari banyaknya para alumni pesantren yang menduduki jabatan di pemerintahan sekarang ini.

Masih menurut Maksum Mukhtar⁷, bahwa pola pembelajaran yang ada di pesantren, seperti bandongan/wetonan, bahtsul masa'il, muhafadzah, demonstrasi, muhawarah, mudzakah, rihlah iqtisodiah dan lain-lain masih perlu di lestarikan. Tetapi harus melihat situasi dan kondisi pondok pesantren yang bersangkutan, karena setiap pondok pesantren memiliki tipe dan karakter yang berbeda-beda.

Abdur Rachman Sholeh⁸ dalam bukunya *Pendidikan Agama dan Keagamaan* menulis bahwa madrasah yang merupakan salah satu bentuk pendidikan di Indonesia juga mampu berinteraksi dengan perkembangan-perkembangan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya, sebagaimana sekolah-sekolah selain madrasah. Hal tersebut dapat dilihat dari visi, misi dan aksi dari madrasah sejak awal berkembang sampai sekarang ini.

Karel A. Steenbrink⁹, dalam bukunya *Pesantren, Madrasah dan Sekolah* menarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam di masa mendatang mengalami perkembangan yang berarti, mulai dari sistem pendidikan yang tradisional berupa pesantren, hingga berupa sekolah formal.

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang pesantren mu'adalah secara khusus belum banyak dilakukan oleh para sarjana dan praktisi pendidikan.

⁷ Maksum Mukhtar, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, (Jakarta: Dirjenbinbagais, 2003)

⁸ Abdul Rachman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan; Visi, Misi dan Aksi*. (Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000)

⁹ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986)

Hal ini dimungkinkan karena program akreditasi pondok pesantren yang dilakukan oleh pemerintah tersebut baru dilaksanakan pada tahun 1988. Dan sampai sekarang (2008) tampaknya pemerintah masih mencari format yang tepat terhadap kebijakan akreditasi pondok pesantren dengan penyetaraan ijazah tersebut.

Penelitian tentang pesantren mu'adalah pernah dilakukan oleh Ratna Untari.¹⁰ Dalam tesisnya ia membahas “pondok pesantren dan persamaan ijazah”. Penelitian tersebut merupakan analisa pengaruh penyetaraan ijazah di pondok modern Gontor Ponorogo. Pada saat penelitian tersebut dilakukan (2003) hanya terdapat 3 pondok pesantren yang sudah di akreditasi dan disetarakan ijazahnya yakni pesantren Gontor Ponorogo (1998 oleh Depag, 2000 oleh Diknas), pesantren Al-Amin Preduan (2000), dan Pesantren Modern Al-Barokah Nganjuk (2002), serta beberapa pondok pesantren yang masih dalam proses penyetaraan (2003). Ia berkesimpulan bahwa eksistensi pondok Modern Darussalam Gontor semakin mapan dengan disetarakannya ijazah pondok dengan SMA/MA.

Abdullah Syukri Zarkasyi¹¹ dalam bukunya *Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren* mengemukakan bahwa manajemen pendidikan di pondok modern Gontor dapat dijadikan salah satu rujukan oleh lembaga-lembaga pendidikan sejenis dalam melakukan transformasi di pesantren. Hal ini berdasarkan pengalaman Pondok Modern Gontor yang selalu istiqamah

¹⁰ Ratna Untari, *Tesis: Pondok Pesantren dan Persamaan Ijazah*, (ttp: tnp, 2003)

¹¹ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

untuk tidak merubah sistem pendidikan yang sudah ada sejak mulai didirikan sampai sekarang (\pm 82 tahun), bahkan tidak mau mengikuti kurikulum pemerintah dengan madrasahnyanya.

Menurut penulis, penelitian yang akan dilakukan merupakan lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan diatas. Hanya saja penelitian ini terfokus pada pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta yang di akreditasi pada tahun 2003. Seberapa besar pengaruh akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pondok tersebut, baik pada Kyai, para Ustadz/Ustadzah, Karyawan, Santri, wali santri, masyarakat dan semua yang terlibat didalamnya. Dan diharapkan dengan penelitian ini dapat lebih melengkapi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.



E. Kerangka Teori

Secara historis lembaga pendidikan yang pertama di Indonesia adalah pesantren. Meskipun pesantren, seringkali dianggap sebagai sebuah institusi yang tradisional dan konservatif, namun harus diakui bahwa pesantren memiliki ketangguhan untuk dapat survive hingga kini. Walaupun masih kukuh dalam memegang sistem yang dimilikinya, pesantren juga telah melakukan perubahan dengan mengambil model sistem di luar, yang di pandang berdampak pada perkembangan yang lebih baik ke depan. Dengan sistem pembelajaran yang fleksibel terbut, pesantren masih mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Islam Indonesia untuk mendidik dan memberikan bekal keilmuan bagi anak-anak mereka.

Struktur pendidikan Islam di Indonesia, menurut Muntaha Azhari¹²

terbagi kedalam empat jenis, yaitu:

1. Pendidikan Pondok Pesantren, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional, bertolak dari pengajaran Qur'an dan Hadits, dan merancang segenap kegiatan pendidikannya untuk mengajarkan segala bentuk kehidupan yang lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain.
2. Pendidikan Madrasah, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan model Barat, yang menggunakan metode pengajaran klasikal, dan berusaha menanamkan Islam sebagai landasan hidup kedalam diri siswa.
3. Pendidikan Umum yang bernafaskan Islam, yaitu pendidikan Islam yang dilakukan melalui pengembangan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam di lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat umum dan terbuka.
4. Pelajaran Agama Islam, yaitu pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja.

Pondok pesantren diartikan sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, umumnya dengan cara non-klasikal, dimana seorang kyai mengajarkan agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama Arab abad pertengahan. Para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.¹³

Menurut Yacub, pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang umumnya dengan cara non-klasikal, pengajarnya seorang yang mempunyai ilmu agama Islam melalui kitab-kitab agama Islam klasik (kitab kuning) dengan tulisan Arab dalam bahasa Melayu Kuno atau dalam bahasa Arab. Kitab-kitab yang diajarkan biasanya hasil karya ulama-ulama Islam

¹² Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989), hal. 184.

¹³ Tim LP3ES, *Profil Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1975), hal. 6.

(Arab) dalam zaman pertengahan.¹⁴ Sedangkan menurut Zamakhsary Dhofier, pesantren itu harus terdiri dari lima unsure pokok yakni: kyai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.¹⁵

Imam Zarkasyi mendefinisikan pondok pesantren sebagai “lembaga pendidikan agama Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebagai pigur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.”¹⁶

Definisi pondok pesantren menurut Imam Zarkasyi tersebut apabila dijabarkan dapat di pahami, bahwa sebuah lembaga dapat disebut sebagai pondok pesantren apabila ia memenuhi ciri-ciri sebagai berikut;

1. Berbentuk asrama.
2. Kyai sebagai sentral pigur yang berperan sebagai guru (*ustadz*, *mu'allim*), pendidik (*muraabi*), dan pembimbing (*mursyid*).
3. Masjid sebagai pusat kegiatan
4. Santri sebagai peserta didik
5. Materi yang diajarkan tidak terbatas kitab kuning saja.¹⁷

Pengertian pesantren menurut Imam Zarkasyi tampaknya lebih komprehensif, karena mewakili semua unsur yang ada dalam sebuah pesantren

¹⁴ Muhammad Yacub, *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 65.

¹⁵ Zamakhsary Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1984), hlm. 19.

¹⁶ Imam Zarkasyi, *Pekan Perkenalan*, (Gontor: Darussalam Press, 1994), Bagian II.

¹⁷ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren. cct.1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 4.

sekaligus membedakan pendidikan pondok pesantren dengan lembaga pendidikan dalam bentuk yang lain.

Sejak pesantren mulai pertama kali berdiri, bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pesantren sudah sangat bervariasi. Mulai dari bentuk yang paling sederhana berupa baca tulis al-Qur'an di masjid sampai pada pendidikan agroindustri, pertanian, perikanan, kelautan dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk pendidikan yang ada di pesantren dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yakni:

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA dan PT Agama Islam) maupun yang memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMA dan PT Umum), seperti pesantren Tebuireng Jombang dan pesantren Syafi'iyah Jakarta.
2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meskipun tidak menerapkan kurikulum nasional, seperti pesantren Gontor Ponorogo dan Ta'mirul Islam Surakarta dan lain sebagainya. Pesantren tipe ini biasanya menyelenggarakan Kulliyatul Mu'allimin/at Al-Islamiyyah (KMI), Tarbiyatul Mu'allimin/at Al-Islamiyyah (TMI), atau Madrasatul Mu'allimin/at Al-Islamiyyah (MMI).
3. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk Madrasah Diniyah (MD), seperti pesantren Lirboyo Kediri dan pesantren Tegalrejo Magelang. Pesantren tipe ini menyelenggarakan Madrasah Diniyah Ula, Madrasah Diniyah Wustha, Madrasah Diniyah 'Ulya, dan Ma'had Aly.
4. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian. (Depag RI)¹⁸

Pada tahun 1998 pemerintah RI melalui Departemen Agama mengakreditasi pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo dengan memberi pengakuan penyetaraan ijazah dan tahun 2000 oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kemudian dilanjutkan dengan akreditasi dan

¹⁸ Depag RI, *Pedoman Pengembangan*, 2004, hal. 7.

pengakuan-pengakuan serupa kepada pondok-pondok pesantren tipe kedua dan ketiga lainnya di Indonesia.

Di antara pondok pesantren yang telah di akreditasi dan mendapatkan pengakuan berikutnya adalah pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta. (pada tahun 2003 dengan SK Mendiknas No. 240/C/KEP/MN/2003).

Pondok-pondok pesantren yang telah diakreditasi dan mendapat pengakuan pemerintah tersebut dinamakan "Pesantren Mu'adalah"¹⁹, yang artinya pendidikan pesantren yang disetarakan dengan SMP/MTs dan SMA/MA. Dengan pengakuan tersebut, ijazah/sertifikat yang dikeluarkan oleh pesantren mu'adalah dapat digunakan oleh alumninya melanjutkan studi ke semua perguruan tinggi dengan tanpa mengikuti Ujian Nasional serta mendapatkan pekerjaan di semua instansi yang ada.

Pengakuan pemerintah terhadap sistem pendidikan di beberapa pondok pesantren, tampaknya terus dilanjutkan dan di kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang merupakan sebuah peluang emas bagi pengembangan pesantren. UU tersebut menghapus diskriminasi terhadap pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini. Pasal 30 ayat 4 menyatakan, bahwa pendidikan diniyah dan pesantren diakui sebagai bentuk pendidikan keagamaan.

Alumni pendidikan diniyah dan pesantren akan mendapat perlakuan dan pengakuan yang sama dengan alumni pendidikan umum. Kiprah para

¹⁹ Depag RI, *Pedoman Penyusunan.....*, hal. iii.

alumni kedua macam lembaga pendidikan tersebut terhadap kesinambungan pendidikan dan masyarakat tidak akan terhalang hanya karena mereka tidak memiliki ijazah pendidikan formal yang diterbitkan pemerintah.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka kerangka teori yang akan dikembangkan adalah mendeskripsikan pengaruh/eksistensi akreditasi pondok pesantren dengan penyetaraan ijazahnya baik secara internal maupun eksternal terhadap pesantren mu'adalah dengan lahirnya UU No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Internal berarti apa yang ada di dalam sistem, sedangkan eksternal adalah yang berada diluar sistem tetapi masih ada hubungan dengan sistem.

1. Pengaruh internal

Internal yang dimaksud adalah mekanisme kerja maupun tata organisasi pondok pesantren sebagai suatu system yang antar komponennya harus terkait antara satu dengan lainnya.

Maju dan berkembangnya sebuah pondok pesantren tergantung dari komponen-komponen yang ada di dalam system itu sendiri. Apabila komponen-komponen yang ada mempunyai sumber daya yang inovatif, kreatif, dan efektif maka sebuah pondok pesantren akan dapat berkembang dan selalu eksis dalam perkembangan pendidikan yang ada.

2. Pengaruh eksternal

Eksternal yang di maksud dalam penelitian ini adalah perkembangan yang terjadi di luar system sebagai jawaban dari seberapa besar pengaruh internal yang terjadi terhadap pondok pesantren.

Mampukah pondok pesantren yang merupakan institusi pendidikan tertua di Indonesia dengan manajemen dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya menjadi rujukan system pendidikan nasional dan menjawab tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya.

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study). Pertama kali yang akan dilakukan adalah mengklarifikasi informasi baik teoritik maupun empiric. Masalah yang akan diungkap dan di deskripsikan dalam penelitian ini adalah menyangkut bagaimana program akreditasi dilaksanakan pemerintah, eksistensi pondok pesantren Ta'mirul Islam, serta pengaruh program akreditasi tersebut terhadap perkembangan pondok pesantren dilihat dari sudut internal maupun eksternal.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan social²⁰. Data yang di dapatkan sangat tergantung pada hasil interview, observasi, dan telaah dokumentasi.

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985)

2. Subyek dan obyek penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data utama penelitian yang diperoleh dengan cara interview/wawancara dan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan pondok, direktur KMI, guru/ustadz senior, karyawan, santri dan masyarakat sekitar pondok.

Adapun sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi yang memuat tentang pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini

3. Tempat atau lokasi penelitian

Tempat dan lokasi penelitian adalah di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Jalan KH. Samanhudi No. 3 Tegalsari Surakarta Jawa Tengah Telp. (0271) 714266 – 741310 Po. Box. 441. [http\www.tamirulislam.com](http://www.tamirulislam.com)
email: info@tamirulislam.com

4. Validitas dan reliabilitas data

Guna menjaga validitas dan reliabilitas data, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data²¹, yakni:

- a. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan peneliti.
- b. Memperbanyak subjek sumber data untuk setiap focus penelitian:
 - 1) Membandingkan hasil wawancara dengan pihak lain yang terkait

²¹ Hujair Ah. Sanaki, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Materi XIII (Materi Kuliah dalam Bentuk Handout)*, (Tnkp: Tnp, 2007), hal. 22 - 26.

- 2) Membandingkan hasil pengamatan langsung selama penelitian berlangsung
- c. Memanfaatkan bahan referensi yang relevan dengan bahan penelitian
- d. Berdiskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap bahan penelitian.
- e. Mengadakan member check pada setiap akhir wawancara atau pembahasan dengan responden agar diperoleh persamaan persepsi tentang suatu masalah
5. Deskripsi data
- a. Metode interview (wawancara), yaitu suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi.²² Wawancara yang akan dilakukan adalah berdasarkan agenda wawancara dan daftar pertanyaan terbuka yang telah dipersiapkan sebelumnya. Maka sampel informan ditetapkan terdiri dari unsur pimpinan pondok, direktur KMI, guru/ustadz senior, karyawan, santri, alumni dan masyarakat sekitar pondok. Dengan ini diharapkan analisa data-data yang didapatkan mencapai validitas pemaknaan melalui konfirmasi berbagai pandangan sesuai dengan temuan-temuan yang ada dilapangan.
- b. Metode pengamatan/observasi, yaitu mengamati dan mendengar perilaku seseorang/informan selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian, serta mencatat penemuan yang

²² James A. Black, Dean J. Champion, *Methods And Issues in Sosial Research*, alih bahasa, E Koswara dkk, Cet. 3 (Bandung: PT. Refika,,2001), hal. 306.

memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis.²³

Metode ini mengerahkan kemampuan jiwa secara aktif untuk menyadari adanya suatu studi yang di sengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat²⁴. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, yakni untuk mendeteksi pola perilaku social informan dalam kehidupan akademik di pondok pesantren disesuaikan dengan indikator-indikator yang telah ditentukan.

- c. Metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dapat mendukung kesempurnaan studi dari data yang terkumpul sebelumnya/arsip data²⁵. Dengan metode ini dapat di ambil dokumen sejarah dan situasi sekarang. Dokumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen resmi yang memuat tentang pondok pesantren Ta' mirul Islam Surakarta, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP. No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta undang-undang dan peraturan-peraturan yang lain; serta data-data yang mendukung penelitian ini.

6. Analisis dan alat analisis data

²³ James A. Black, Dean J. Champion, *Methods And Issues*, hal. 286.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi aksara, 1995), hal. 63.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. X. (Yogyakarta: Roneka Cipta, 1996), hal. 234.

Karena dalam mendiskripsikan data menggunakan metode interview, observasi dan dokumentasi, maka analisa data yang dilakukan dengan cara analisa data kualitatif dengan metode deskriptif analisis²⁶. Yakni dengan mendiskripsikan berbagai hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, melacak dan mensistematiskan berbagai konsep sedemikian rupa, serta menganalisa dari berbagai sumber tentang akreditasi terhadap pondok pesantren.

Penelitian ini akan memaparkan secara deskripsi tentang pengaruh akreditasi terhadap Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta dengan menginventarisir, membandingkan dan menyimpulkan data dengan selalu berpedoman pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab, antara yang satu dengan yang lain saling terkait, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang didalamnya membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas tentang sekilas profil pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, sejarah singkat, dan sistem manajemennya.

Bab ketiga dibahas dasar akreditasi pondok pesantren serta proses akreditasi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hal.1

Pada bab keempat akan diuraikan analisis pengaruh akreditasi terhadap pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta baik secara internal maupun eksternal.

Bab kelima merupakan bab penutup yang didalamnya mencakup kesimpulan dan saran-saran. Dan diakhir tesis ini juga akan ditambahkan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang mendukung validitas data dan bobot keilmiahan penulisan.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

PROFIL PONDOK PESANTREN TA'MIRUL ISLAM

A. Sejarah Singkat Berdiri dan Perkembangan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta

1. Sejarah Singkat

Pada hakekatnya Pondok Pesantren Ta'mirul Islam ini telah direncanakan sejak berdirinya masjid Tegalsari Surakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh para ulama yang berada di desa Tegalsari. Namun cita-cita suci tersebut tidak dapat terwujud dikarenakan suatu hal yang tidak memungkinkan, yang pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda.

Tahun 1968, cita-cita untuk mendirikan pondok pesantren mulai dirintis dengan dibentuknya Yayasan Ta'mirul Masjid Tegalsari Surakarta. Yayasan ini kemudian mendirikan SD Ta'mirul Islam. Dan pada tahap perkembangannya, pada tahun 1979 didirikan SMP Ta'mirul Islam.

Untuk menjawab tantangan zaman dan harapan masyarakat sekitar, pada tanggal 14 Juni 1986 Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta resmi berdiri dengan diawali kegiatan berupa Pesantren Kilat atau yang populer disebut Pesantren Syawal, karena dilaksanakan pertama kali di bulan Syawwal.

Pendirian Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Tegalsari Surakarta diprakarsai oleh :

- a. KH. Naharussurur (Pimpinan Pondok)
- b. Hj. Muttaqiyah (Almh)
- c. KH. Muhammad Halim, SH. (Direktur Utama KMI)

d. Muhammad Wazir Tamami, SH. (Direktur SDM)

Keberadaan pondok ditengah-tengah kampung Tegalsari ini disambut baik oleh masyarakat sekitar pondok maupun masyarakat luas. Khususnya bagi mereka yang ingin mempelajari dan menelaah ilmu-ilmu duniawi serta ukhrawi, mengingat manusia tidak bisa dipisahkan oleh dua hal ini.

2. Visi dan Misi

Visi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam adalah: **menciptakan kader ulama bagi ummat**. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 5 yang berbunyi:

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. (QS. Al-Mulk, 67:5)

Bintang dari kehidupan di dunia adalah ulama, maka ulama-lah yang akan menjaga umat manusia dari kenistaan hidup di dunia yang sifatnya hanya sementara.

Misi yang di emban adalah:

- a. Memperbaiki serta meningkatkan akhlaq para penerus bangsa. Hal ini merupakan kelebihan pondok pesantren dari lembaga **pendidikan** lain. Yaitu keuntungan yang bersifat batiniyah dan dlohiriyah.
- b. Mempersatukan dan mempererat hubungan antar ummat. Untuk itu Ta'mirul Islam ber-kedudukan untuk semua golongan dan tidak dibawah satu golongan.

c. Membentuk generasi yang Tarbawi dan Islami

3. Motto

a. **Iso Ngaji Lan Ora Kalah Karo Sekolah Negri.** Dengan motto ini diharapkan santri dapat memperdalam ilmu-ilmu yang bersifat ukhrowi maupun duniawi.

b. **Al-Qur'an Taajul Ma'had (Al-Quran Mahkota Pondok).** Motto ini mendorong para santri untuk dapat menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang dilakukan santri diharapkan selalu sesuai dengan Al-Quran.

c. **Al-Lughotul Libaasul Ma'had (Bahasa adalah Pakaian Pondok).** Dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris sebagai pengantar dalam kegiatan keseharian di Pondok, diharapkan semua santri mampu mendalami semua disiplin ilmu. Karena kedua bahasa tersebut telah menjadi bahasa internasional.

4. Panca Jiwa

Disamping motto yang ada, Ta'mirul Islam mempunyai panca jiwa yang menjadi ruh pondok dalam setiap aktivitas sehari-hari. Lima jiwa itu adalah :

a. Jiwa *keikhlasan*. (Sepi ing pamrih) Bukan karena didorong oleh keinginan mencari keuntungan tertentu, tapi semata-mata karena Allah SWT. Hal ini meliputi segenap kehidupan di Pondok. Ustadz/Ustadzah ikhlas dalam mengajar, para santri pun ikhlas dalam belajar.

- b. Jiwa *kesadaran*. Segenap pengasuh, ustadz maupun ustadzah serta para santri melaksanakan perannya masing-masing dengan penuh kesadaran. Semua tahu dan mengerti akan tugasnya, yaitu beribadah lillahi ta'ala.
- c. Jiwa *kesederhanaan*. Kehidupan di pondok diliputi suasana kesederhanaan tapi agung. Sederhana belum tentu pasif atau miskin, tetapi sederhana mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi perjuangan hidup dengan kesulitan.
- d. Jiwa *keteladanan*. Setiap orang harus siap menjadi teladan dalam kebaikan bagi orang lain. Seorang Kyai akan selalu diteladani oleh para guru dan santrinya, para ustadz dan ustadzah harus menjadi teladan yang baik untuk para santrinya. Santri yang junior harus mau meneladani kakak-kakaknya yang baik dan begitu seterusnya. Sehingga satu sama lain saling meneladani dalam hal kebaikan.
- e. Jiwa *kasih sayang*. Kasih sayang menjadi ruh pendidikan. Kesombongan, kebodohan, kemalasan, dan kemarahan hanya dapat diluruskan dengan kasih sayang. Kasih sayang yang benar yang tidak menghalangi ditegakkan disiplin dan peraturan. Seorang anak yang mendapatkan sangsi dari pengasuhnya, bukanlah sedang dihukum karena dendam atau kemarahan, tetapi semata-mata adalah untuk perbaikan dengan penuh kasih sayang.

5. Pendidikan dan Pengajaran

Kegiatan Belajar Mengajar Ta'mirul Islam meliputi beberapa unit kegiatan, yaitu :

- a. Kulliyatul Mu'allimin/at Al-Islamiyyah Ta'mirul Islam (pendidikan setingkat SMP/MTs dan SMA/MA)
- b. Madrasah Tsanawiyah Ta'mirul Islam
- c. Tahfidzul Quran.
- d. Pengajian Manasik Haji
- e. Ma'had 'Aly (Setingkat Perguruan Tinggi)
- f. KB/TK Ta'mirul Islam
- g. Al-Quran

Para santri yang sudah lancar membaca Al-Quran baik fashohahnya maupun tajwid diwajibkan menghafal juz'amma. Hafalan tersebut harus benar-benar baik bacaannya dari sisi ilmu tajwid.

Santri yang telah duduk dikelas tiga yang memiliki hafalan yang kuat dianjurkan menghafal Al-Quran minimal satu juz setiap tahunnya. Sehingga mereka lulus dari Pondok Pesantren Ta'mirul Islam setidaknya memiliki hafalan Al-Quran empat juz. Untuk melaksanakan program tersebut dibuat kurikulum tersendiri mengenai Al-Quran ini, yaitu :

- 1) Tahsinul Qiroah (perbaikan bacaan).
 - 2) Hifdzul Juz'amma.
 - 3) Qiroah 30 juz didepan Ustadz.
 - 4) Halaqoh dan Tahfidz.
 - 5) Ta'limul Quran
- h. I'tikaf dan Da'wah

Kegiatan berlaku bagi semua santri dari kelas satu sampai kelas enam walaupun tidak bersifat wajib. Program ini diadakan setiap Kamis siang sampai Jumat sore. Kegiatan berupa I'tikaf secara berkelompok di masjid-masjid sekitar Solo. Para santri bermukim selama sehari semalam di masjid tersebut. Selain itu mereka harus mengajak masyarakat di sekitar masjid untuk turut dalam kegiatan yang mereka laksanakan, setidaknya dalam hal sholat berjama'ah dan membaca Al-Quran.

Program I'tikaf ini semata-mata ditujukan untuk melatih santri mengajarkan ajaran Nabi Muhammad secara maksimal dan mengenalkan mereka pada masyarakat yang kelak akan menjadi obyek da'wah mereka.

6. Kulliyatul-Mu'allimin/at Al-Islamiyah (KMI)

Kulliyatul *Mu'allimin/at al-Islamiyah* (KMI) adalah salah satu lembaga yang menangani pendidikan tingkat menengah di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam. Lembaga ini didirikan tanggal 20 Agustus 1989. Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI) merupakan lembaga Pendidikan Guru Islam yang mengutamakan pembentukan kepribadian dan sikap mental, dan penanaman ilmu pengetahuan Islam.

Dalam sejarah perjalanannya, KMI pada awalnya merupakan singkatan dari Kulliyatul Mujahidin Al-Islamiyyah, kemudian pada tahun 2003 berubah nama menjadi Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah sampai sekarang. Hal ini tidak terlepas dari misi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam yakni *membentuk generasi tarbawi dan Islami*.

a. Program Pendidikan

Terdapat dua macam program yang ditempuh santri di KMI Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, program reguler dan program intensif.

1. Program Reguler.

Program ini diperuntukkan bagi siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtida'iyah (MI), dengan masa belajar 6 tahun, yakni ditempuh dari kelas I (setingkat kelas VII SMP/MTs) secara berurutan sampai kelas VI (setingkat kelas XII SMA/MA).

2. Program Intensif/Takhossus

Program ini diikuti oleh siswa-siswi lulusan SMP atau MTs dan di atasnya, dengan masa belajar 4 tahun, dengan urutan kelas I, III, V, dan VI. Kelas intensif sebenarnya hanya diselenggarakan pada kelas I dan III, karena itu disebut kelas I intensif dan III intensif. Sedangkan di kelas V mereka belajar secara reguler bersama-sama dengan lulusan SD atau MI yang juga sudah duduk di kelas V, demikian pula halnya dengan kelas VI. Pada program intensif (kelas I dan III), sebagian materi umum tidak diajarkan, sedangkan mata pelajaran Matematika diajarkan dengan alokasi waktu setengah dari waktu kelas reguler. Adapun mata pelajaran Bahasa Inggris tetap diajarkan secara seimbang dengan kelas reguler. Alokasi waktu mata pelajaran umum yang tidak diajarkan diisi dengan mata pelajaran kelompok Bahasa Arab dan kelompok Dirasah Islamiyah.

Di samping kedua program ini, bagi santri baru yang pernah belajar di pondok-pondok yang dikelola alumni Gontor ataupun pondok-pondok

lain, setelah mereka lulus mengikuti ujian masuk; baik di kelas intensif maupun reguler, yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian ke kelas yang lebih tinggi, dan begitu seterusnya hingga kelas 5.

b. Jam Belajar

Jam belajar santri di KMI berlangsung dari jam 07.00 - 14.40 WIB, dengan waktu istirahat 2 kali, yakni pada jam 09.40-10.10 dan jam 12.10-14.00. Waktu belajar tersebut dibagi menjadi 8 jam pelajaran, masing-masing mendapat alokasi waktu 40 menit dan khusus untuk jam ke-8 mendapat alokasi waktu 50 menit.

c. Tujuan

Tujuan pembelajaran di KMI Pondok Pesantren Ta'mirul Islam adalah mencetak santri yang tarbawi dan islami, mukmin muslim, taat menjalankan dan menegakkan syariat Islam, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada bangsa dan negara.

d. Kurikulum

Kurikulum yang diterapkan di KMI dapat dibagi menjadi beberapa bidang studi sebagai berikut: Bahasa Arab (Semua disampaikan dalam Bahasa Arab), Dirasah Islamiyah (kelas II ke atas, seluruh mata pelajaran ini menggunakan bahasa Arab), Kependidikan dan Keguruan, Bahasa Inggris (dengan bahasa Inggris), Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Kewarganegaraan/Ke-Indonesiaan.

Komposisi kurikulum yang ditetapkan tersebut tentunya mempunyai tujuan tertentu. Pengetahuan Bahasa Arab dimaksudkan untuk membekali santri kemampuan berbahasa Arab yang menjadi kunci untuk memahami sumber-sumber Islam dan khazanah pemikiran Islam. Sedangkan Bahasa Inggris digunakan untuk media komunikasi modern dan mempelajari pengetahuan umum, bahkan juga pengetahuan agama, karena saat ini tidak sedikit karya-karya di bidang studi Islam ditulis dalam Bahasa Inggris.

Dalam kurikulum KMI diupayakan terwujudnya keseimbangan dan perpaduan antara pengetahuan agama (Dirasah Islamiyah) dan pengetahuan umum (IPA dan IPS).

Mata pelajaran ke-Indonesiaan atau kewarganegaraan adalah untuk memahami dan menghayati dan menghargai tradisi, budaya, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan bangsa Indonesia.

C. Tenaga Pengajar

Guru yang mengajar di KMI Ta'mirul Islam adalah alumni dari Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, Pondok Modern Gontor Ponorogo, serta para praktisi pendidikan dan alumni dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri/Swasta baik yang ada di dalam maupun luar negeri.

D. Siswa

Siswa KMI memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi. Mereka berasal dari seluruh pelosok Nusantara dan beberapa diantaranya berasal dari Singapura dan Malaysia.

E. Pengakuan-Pengakuan

Di samping memperoleh pengakuan dari Pemerintah Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 240/C/KEP/MN/2003), Ijazah KMI Pondok Pesantren Ta'mirul Islam juga dapat pengakuan dari luar negeri, yakni dengan mu'adalah (persamaan) Universitas al-Azhar, Mesir tahun 2008 dengan surat keputusan tertanggal 31 Maret 2008.

F. Kegiatan-Kegiatan

Kegiatan yang dimaksudkan di sini tidak hanya yang bersifat intra-kurikuler, tetapi meliputi segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga KMI, karena ada yang bisa digolongkan ke dalam kegiatan ko-kurikuler atau bahkan ekstra-kurikuler. Sebagaimana disebutkan di atas kegiatan KMI ini terdiri dari harian, mingguan, tengah tahunan, dan tahunan.

1. Kegiatan Harian

Kegiatan harian ini meliputi:

- a) Supervisi proses pembelajaran, dilakukan oleh bagian Kegiatan Belajar Mengajar dan Sumber Daya Manusia.
- b) Pengecekan persiapan mengajar, dilakukan oleh guru-guru senior yang bertugas secara bergantian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- c) Pengawasan disiplin masuk kelas, agar tidak ada santri yang terlambat masuk kelas.

- d) Pengontrolan kelas saat pelajaran berlangsung oleh guru piket. Pengontrolan kelas untuk mengecek apakah ada kelas yang tidak ada gurunya dan untuk mengetahui ketepatan waktu hadir guru di kelas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kelas ada guru pengajarnya dan bahwa guru pengajar masuk tepat waktu.
- e) Pengontrolan asrama santri saat pelajaran berlangsung oleh guru yang bertugas untuk memastikan bahwa tidak ada siswa yang tidak masuk kelas, kecuali dengan izin. Di samping itu guru juga mengontrol kebersihan, keasrian, dan kenyamanan asrama.
- f) Pengawasan belajar malam yang dimulai setelah sholat Isya' sampai pukul 21.00 dan dilanjutkan dengan muwajjah bersama wali kelas atau ustadz terjadwal, berlangsung pada jam 21.00-21.30.
- g) Pembagian tugas "Jum'at bersih" untuk tiap kelas, agar kebersihan kelas tetap terjaga.
- h) Musyawarah guru KMI ba'da Zhuhur guna mengevaluasi kegiatan belajar mengajar selama sehari.

2. Kegiatan Mingguan / Bulanan

- a) Pertemuan guru KMI setiap Kamis pada akhir bulan berjalan, untuk mengevaluasi kegiatan belajar mengajar selama sebulan. Forum ini juga digunakan oleh Pimpinan Pondok untuk menyampaikan program-program dan masalah-masalah Pondok secara keseluruhan.
- b) Pertemuan ketua-ketua kelas (Jum'at malam) untuk menyampaikan informasi seputar aktifitas belajar-mengajar dan disiplin dalam kelas.

- c) Musyawarah rutin dua minggu sekali setiap malam Rabu, guna mengevaluasi dan mempleno kerja dan program kerja setiap bagian.

3. Kegiatan Tengah Tahunan

Program tengah tahunan di KMI adalah ujian mid semester, semester I (Gasal) dan II (Genap). Panitia ujian ini terdiri dari beberapa guru dibantu oleh seluruh siswa kelas VI.

4. Kegiatan Tahunan

Kegiatan ini lebih merupakan kegiatan penunjang keberhasilan belajar siswa. Program ini meliputi:

- a) Fath al-Kutub: Kegiatan ini adalah latihan membaca kitab (terutama kitab klasik) untuk kelas V dan VI, juga sebagai wahana menguji kemampuan mereka dalam berbahasa Arab. Santri diberi tugas untuk membahas persoalan-persoalan tertentu dalam bidang aqidah, fikih, hadis, tafsir, akhlak, dll. Para santri diharuskan menyerahkan laporan tertulis mengenai hasil kajiannya kepada guru pembimbing. Kegiatan ini berlangsung seminggu.
- b) Fath al-Mu'jam: latihan dan ujian membuka kamus berbahasa Arab untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan berbahasa Arab santri, terutama dalam menelusuri dan mencari akar dan makna kosa kata.
- c) Amaliyat al-Tadris, yakni ujian praktik mengajar (micro teaching) untuk siswa kelas 6.

- d) Al-Rihlah al-Iqtishadiyah (vocational guidance): orientasi tentang dunia usaha dan kewiraswastaan. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan jiwa kewiraswastaan kepada para santri. Kegiatan ini diberikan melalui ceramah-ceramah dan kunjungan ke obyek usaha di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
- e) Penulisan karya ilmiah berupa takhrijul hadits mengenai diterima atau tidaknya sebuah hadits dalam bahasa Arab sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas keilmuan santri kelas 6.
- f) Pembekalan wawasan mengenai berbagai persoalan untuk santri kelas VI menjelang tamat belajar di KMI. Pembekalan ini meliputi kegiatan-kegiatan berikut:
- 1) Orientasi tentang metode dakwah, belajar di perguruan tinggi, wawasan pengembangan kemasyarakatan, kepesantrenan, perpustakaan, studi Islam, dan pers dan jurnalistik.
 - 2) Ceramah dan dialog mengenai berbagai macam aliran dalam Islam baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri.
 - 3) Kursus komputer dan penataran untuk mengajar TPA/Q.
- g) penerimaan santri baru setiap awal tahun pelajaran (bulan Juni s.d. pertengahan Juli)

G. Pengasuhan Santri

Pengasuhan santri adalah lembaga yang membina seluruh kegiatan santri di luar kelas. Lembaga ini ditangani oleh Pengasuh Pondok yang sekaligus juga Pimpinan Pondok, KH. Naharussurur dan KH. Muhammad Halim, SH.

Halim, SH. Selaku wakilnya. Beliau berdua dibantu oleh para staf pengasuhan, baik di tingkat perguruan tinggi (Ma'had 'Aly) maupun di tingkat KMI guna mengkoordinir penegakkan disiplin, tata tertib dan sunnah-sunnah Pondok Pesantren.

Adapun pola pembinaan yang diterapkan untuk mengasuh santri, di antaranya :

a. Fungsi Peningkatan Iman dan Taqwa

Meningkatkan Ubudiyah santri melalui penyelenggaraan sholat tahajjud, I'tikaf, puasa sunnah, da'wah, mujahadah dan pembinaan membaca Al-Quran.

b. Fungsi Pemahaman

Pemahaman tentang diri santri terutama oleh santri sendiri, orang tua, guru, dan pembimbing.

Pemahaman tentang lingkungan santri, termasuk didalamnya lingkungan keluarga dan lingkungan pondok pesantren, terutama oleh santri sendiri, orang tua, guru, dan pembimbing.

Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas termasuk didalamnya informasi tentang pendidikan yang lebih tinggi, lapangan kerja, budaya dan lain-lain.

c. Fungsi Pencegahan

Mengupayakan pencegahan agar santri terhindar dari permasalahan yang mengganggu, menghambat atau menimbulkan dalam proses perkembangan serta dalam proses belajar.

d. Fungsi Perbaikan

Mengupayakan pemecahan atas berbagai permasalahan yang dialami oleh santri.

e. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan.

Mengupayakan agar dapat memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimiliki santri. Mengarahkan dan membina keterampilan berorganisasi dan melatih kepemimpinan santri.

Kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Pengasuhan Santri ini meliputi kegiatan santri tingkat menengah (KMI) dan santri tingkat perguruan tinggi (Ma'had 'Aly). Kegiatan santri di tingkat menengah meliputi kegiatan-kegiatan dalam Organisasi Santri Ta'mirul Islam (OSTI) dan kegiatan Kepramukaan, sedangkan kegiatan santri tingkat perguruan tinggi (mahasiswa) adalah kegiatan yang dikelola oleh Dewan Mahasiswa.

a. Kegiatan Santri

1) *Kegiatan berorganisasi*

Kegiatan berorganisasi di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam telah diadakan sejak 5 Januari 1989. Hal ini dimaksudkan untuk memberi bekal para santri agar dapat memimpin masyarakatnya kelak. Kegiatan berorganisasi ini merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dari kehidupan santri sehari-hari, sebab berorganisasi di Pondok ini berarti pendidikan untuk mengurus diri sendiri dan tentu saja orang lain.

Seluruh kehidupan santri selama berada di dalam Pondok diatur oleh mereka sendiri dengan dibimbing oleh para guru/asatidz. Kegiatan-

kegiatan ini selalu didasari oleh Panca Jiwa Pondok Pesantren, yakni keikhlasan, kesadaran, kesederhanaan, keteladanan, dan kasih sayang. Kelima jiwa ini ditanamkan secara terus-menerus dalam kehidupan santri di pesantren di bawah bimbingan dan pimpinan Pengasuh.

a) *Organisasi Santri Ta'mirul Islam*

Pengurus OSTI adalah santri-santri yang duduk di kelas V semester genap yang terpilih secara demokratis dan dipimpin sampai mereka duduk di kelas VI semester gasal akhir. Pemilihan Presiden OSTI dan Pengurus Kabinetnya diadakan setahun sekali. Calon-calon yang akan duduk sebagai pengurus OSTI berasal dari utusan tiap-tiap Mantiqoh (organisasi asrama) yang dipilih melalui mekanisme pemilihan yang demokratis. Utusan atau wakil-wakil Mantiqoh tersebut diseleksi oleh pembimbing OSTI berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan.

Kemudian pembimbing OSTI menyeleksi 2 atau 3 calon Presiden untuk di pilih oleh seluruh santri pada pemilihan umum presiden. Hasil dari pemilu presiden kemudian dimintakan restu kepada bapak Pimpinan Pondok. Kemudian staff pengasuhan memilih di antara mereka formatur cabinet selengkapnya. Pada setiap bulan Februari atau setelah ujian semester gasal, mereka mengadakan Musyawarah Kerja untuk mengevaluasi dan merancang Program Kerja.

Pada setiap akhir masa jabatan, seluruh pengurus Organisasi ini melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun di depan seluruh santri dan guru-guru serta Pengasuh dan Pimpinan Pondok untuk mendapatkan tanggapan maupun evaluasi. Seusai laporan pertanggungjawaban diadakan serah terima jabatan dari pengurus lama ke pengurus baru terpilih.

Kegiatan-kegiatan santri di dalam Pondok diurus oleh Kabinet OSTI. Pengurus kabinet tersebut adalah: Presiden OSTI, Sekretaris Kabinet, Bendahara Kabinet, Departemen Bahasa, Menteri Pengajaran, Menteri Kepanduan, Departemen Keamanan, Menteri Kesenian, Departemen Olahraga, Menteri Koperasi, Menteri Urusan Pangan, Menteri Urusan Logistik, Departemen Kesehatan, Departemen Kebersihan dan Pertamanan, Menteri Urusan Tamu, Menteri Penerangan.

Organisasi Santri Ta'mirul Islam ini membawahi beberapa organisasi, antara lain: organisasi asrama, klub-klub olahraga, klub-klub kursus kesenian, klub-klub kursus ketrampilan, dan klub-klub kursus bahasa.

b) *Organisasi Kepramukaan*

Kegiatan kepramukaan di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam merupakan sesuatu yang penting karena sebagai sarana pendidikan kepribadian dan sikap mental untuk bekal para santri dalam hidup bermasyarakat.

Seluruh santri Pondok Pesantren Ta'mirul Islam adalah anggota Pramuka. Kegiatan kepramukaan ini ditangani oleh organisasi yang disebut Koordinator Gugus Depan 011059 (putra) dan 011014 (putri) Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, di bawah pengawasan Majelis Pembimbing.

Koordinator Gerakan Pramuka Pondok Pesantren Ta'mirul Islam mengkoordinir 6 Andalan dan 9 Gugusdepan. Pergantian pengurus organisasi ini diadakan setelah mereka menunaikan masa baktinya selama setahun dan setelah memberikan laporan pertanggungjawaban di hadapan para Pimpinan Pondok, para pembina dan andika.



Untuk meningkatkan kualitas kepramukaan para santri, Pondok Pesantren Ta'mirul Islam selalu mengadakan kursus-kursus orientasi. Di antaranya adalah: Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD), Kursus Masa Pengembangan dan Pamantapan (MPP), Kursus Drumb Band, Kursus Orientasi Bhayangkara, Kursus Orientasi Gladian Pimpinan Regu dan Sangga, Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK), Latihan Search And Rescue (SAR)

Di samping itu Koordinator Gerakan Pramuka Pondok Pesantren Ta'mirul Islam juga mengikuti Lomba Perkemahan Penggalang dan Penegak (LP3) antar Gerakan Pramuka Pondok Alumni Gontor dan mengadakan Lomba Tingkat (LTII) Antar Gugus Depan khusus Santri Baru.

c) *Kegiatan Mahasiswa (Dewan Mahasiswa)*

Dewan Mahasiswa Ma'had 'Aly adalah organisasi yang bernaung di bawah struktur pengasuhan santri Pondok Pesantren Ta'mirul Islam. Dewan Mahasiswa bertugas membantu Pengasuh Pondok Pesantren Ta'mirul Islam dalam mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler kemahasiswaan di lingkungan Ma'had 'Aly Pondok Pesantren Ta'mirul Islam. Tugas tersebut dilakukan dengan mengupayakan peningkatan kualitas spiritual, moral, dan intelektual mahasiswa serta menyalurkan aspirasi dan mengembangkan minat dan bakat serta kreatifitas mereka untuk mencapai tujuan pendidikan Pondok dan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Departemen-departemen yang ada di bawah Dewan Mahasiswa terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Departemen keilmuan dan kerohantian, Departemen Kesenian dan Pengembangan Minat dan Bakat, Departemen Komunikasi dan Publikasi, Departemen Olahraga, dan Departemen Koperasi.

2) Kegiatan Harian

Tabel 2.1 Kegiatan Harian Santri

NO	WAKTU	KEGIATAN
1	03.30-05.30	1. Bangun tidur 2. Sholat Tahajud 3. Shalat Subuh berjama'ah. 4. Membaca al-Qur'an 5. Penambahan kosa kata (Arab atau Inggris)
2	05.30-06.15	1. Olahraga 2. Mandi
3	06.15-06.50	1. Makan pagi 2. Persiapan masuk kelas
4	07.00-12.10	Masuk kelas pagi
5	12.10-14.00	1. Keluar kelas 2. Shalat dzuhur berjama'ah 3. Makan siang 4. Persiapan masuk kelas sore
6	14.00-14.50	Masuk kelas siang.
7	14.50-15.30	1. Shalat Ashar berjama'ah 2. Dzikir + pengumuman
8	15.30-16.45	Aktivitas bebas / ekstra kurikuler
9	16.45-17.15	1. Mandi dan persiapan ke Masjid untuk jama'ah Maghrib 2. Makan malam
10	17.15-19.00	1. Shalat Maghrib berjama'ah 2. Membaca al-Qur'an
11	19.00-19.30	Sholat Isya'
12	19.30-21.00	Belajar malam
13	21.00-21.30	Muwajahah dengan wali kelas
14	21.30-03.30	Istirahat dan tidur

Sumber : Arsip TU PPTI 2008

Deskripsi dari tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan santri sehari-hari diawali dengan bangun pagi, shalat Tahajjud secara individu, kemudian shalat Subuh berjama'ah di masjid. Setelah zikir dan wirid ba'da shalat Shubuh dilanjutkan

dengan membaca al-Qur'an secara individu dengan pengawasan dari pengurus OSTI. Kemudian pemberian kosakata atau struktur kalimat bahasa Arab atau Inggris selama 15 menit dan dilanjutkan dengan kegiatan bebas, ada yang belajar, mencuci dan mandi, berolahraga dan lainnya. Pada jam 06.15 bel berbunyi tanda bahwa semua kegiatan dan olahraga sudah harus berhenti, kemudian mandi, makan pagi, dan persiapan masuk sekolah.

2. Jam 06.50 bel berbunyi tanda berakhirnya waktu makan pagi dan santri sudah mengosongkan asrama, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain untuk masuk kelas.
3. Pukul 07.00 mulai kegiatan belajar mengajar di kelas-kelas sampai jam 14.50, dengan dua kali istirahat, jam 09.40-09.10 dan jam 12.10-14.50.
4. Pada jam 12.10 saat istirahat kedua, dipergunakan santri untuk sholat dhuhur di kamar masing-masing bagi kelas I s/d kelas V dan di masjid bagi kelas VI. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang dan istirahat sekedarnya sebelum kemudian pada jam 14.00-14.50 santri-santri kembali masuk kelas untuk materi ke-8. Pada materi ke-8 ini, diperbanyak mata pelajaran bahasa dan mata pelajaran lain untuk menunjang program kelas di pagi hari. Sebagian besar mengajar materi ke-8 bagi kelas I s/d III dan I Takhassus adalah santri kelas VI, sebagai wahana latihan mengajar, dan selebihnya adalah guru haqiqi, khususnya untuk mengajar kelas IV, V dan kelas III Takhassus.

5. Jam 14.50 bel berbunyi tanda berakhirnya materi ke-8 dan kemudian shalat 'Ashar berjama'ah dan dilanjutkan dengan zikir serta pengumuman dari OSTI.
6. Jam 15.30 bel berbunyi lagi tanda dimulainya waktu kegiatan bebas setelah shalat 'Ashar. Kegiatan bebas ini sama dengan kegiatan bebas pada pagi hari. Jam 16.45 seluruh kegiatan berhenti dan para santri bersiap-siap untuk shalat Maghrib berjama'ah serta makan malam. Jam 17.15 seluruh santri harus sudah berada di Masjid guna membaca al-Qur'an menyongsong datangnya shalat Maghrib berjamaah.
7. Lepas shalat Maghrib para santri membaca al-Qur'an di depan Asatidz dan santri yang sudah dipercaya untuk mengajar al-Qur'an sampai jam 19.00.
8. Jam 19.00-19.30 shalat Isya' berjamaah dan pembacaan ta'lim ba'da Isya. Seusai shalat Isya para santri belajar malam untuk mengulangi pelajaran dan mempersiapkan diri untuk pelajaran hari esok. Belajar malam ini dilakukan secara bersama di bawah bimbingan wali kelas masing-masing. Belajar malam ini terkadang digunakan oleh guru-guru untuk menambah pelajaran pagi yang belum sampai target. Pukul 22.30 memasuki waktu istirahat malam dan tidur, untuk kemudian bangun esok hari jam 04.00.

3) Kegiatan Mingguan

Tabel 2.2 Kegiatan Mingguan Santri

NO	KEGIATAN	HARI	WAKTU	KETERANGAN
1	Muhadlarah (Latihan Pidato)	Ahad	14.00 – 15.00	Bahasa Inggris
		Kamis	12.10 – 13.30	Bahasa Arab
		Kamis	20.00 – 21.15	Bahasa Indonesia
2	Pramuka	Kamis	14.00 – 16.00	
3	Muhadatsah	Selasa	05.15 – 05.30	Percakapan dengan bahasa Arab atau Inggris
		Jum'at	05.15 – 05.30	
4	Olahraga Umum	Selasa	05.30 – 06.00	Lari pagi
		Jum'at	05.30 – 07.30	
5	Bersih Lingkungan	Jum'at	07.30 – 08.30	
6	Ekstra Kurikuler	Setiap sore	15.30 – 16.45	Terjadwal

Sumber : Arsip TU PPTI 2008

4) Kegiatan Tahunan

Tabel 2.3 Kegiatan Tahunan Santri

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Pekan Khutbatul 'Arsy	Awal tahun pelajaran	Seluruh santri dan dewan Asatidz
2	Apel dan Karnaval	Awal tahun pelajaran	Seluruh santri dan dewan Asatidz
3	Panggung Gembira Kelas VI	Setelah Khutbatul 'Arsy	-
4	KMD Pramuka	Awal bulan Nopember	Kelas V
5	It-1 dan Kemah Dakwah	Akhir bulan Nopember	Seluruh santri
6	Out Bound	Awal bulan April	Kelas I - V
7	Syi'ar Dakwah Ramadhan	Bulan Ramadhan	Kelas V - VI
8	Khotaman al-Qur'an	Akhir Tahun Pelajaran	-

Sumber : Arsip TU PPTI 2008

BAB III

AKREDITASI PONDOK PESANTREN TA'MIRUL ISLAM

A. Pengertian, Tujuan dan Sasaran Akreditasi

1. Pengertian akreditasi

Akreditasi adalah penilaian madrasah yang dilaksanakan oleh pemerintah.²⁷ Akreditasi pondok pesantren adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah²⁸ dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meskipun tidak menerapkan kurikulum nasional.

Pondok pesantren yang telah diakreditasi oleh pemerintah dinamakan sebagai pesantren mu'adalah. Dan para lulusan pesantren mu'adalah berhak untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya dengan menggunakan ijazah dari pesantren.

2. Tujuan akreditasi

Tujuan akreditasi pondok pesantren secara khusus adalah upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi lulusan pondok pesantren untuk dapat meneruskan studinya kejenjang yang lebih tinggi serta pengakuan terhadap eksistensi lembaga pondok pesantren setingkat dengan sekolah/madrasah formal.

²⁷ Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, lihat : Depag RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta UU RI No. 20 Tahun 2005 tentang SISDIKNAS*. (Dirjen Pendis Depag RI: Jakarta, 2006), hal. 38.

²⁸ Depag RI, *Pedoman Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru di Pesantren Mu'adalah dalam Jabatan*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam, 2007), hal. iii.

Adapun tujuan akreditasi secara umum adalah:

- a. Mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren melalui:
 - 1) Terjaganya kurikulum khas pondok pesantren
 - 2) Ketersediaan tenaga kependidikan yang cukup, kualitas dan kuantitasnya.
 - 3) Ketersediaan sarana/prasarana pendidikan yang memadai.
 - 4) Pelaksanaan administrasi pendidikan yang baik.
- b. Mendorong tercipta dan terpeliharanya ketahanan pondok pesantren dan lingkungannya.
- c. Mendapatkan bahan-bahan bagi perencanaan dalam rangka pembinaan pondok pesantren yang bersangkutan
- d. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab.
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan pondok pesantren.
- f. Memudahkan pengaturan mutasi murid/siswa/santri.

3. Sasaran Akreditasi Pondok Pesantren

Sasaran Akreditasi Pondok Pesantren adalah seluruh lembaga pendidikan yang di selenggarakan oleh pondok pesantren yang mengajukan permohonan ke Departemen Pendidikan Nasional guna penyetaraan ijazah setingkat SMU/MA.

Adapun pondok pesantren yang di akreditasi minimal memiliki lembaga pendidikan/madrasah antara lain:

- a. Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (KMI), Tarbiyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (TMI), Madrasah Mu'allimin al-Islamiyyah (MMI).
- b. Madrasah Diniyah 'Ulya atau tingkat Takhassus yang telah lulus jenjang Wustho
- c. Madrasah Salafiyah 'Ulya, Salafiyah 'Aly atau 'Aliyah.
- d. Lembaga pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pondok pesantren yang tidak disinkronkan dengan sekolah formal (SMU/MA)

B. Pelaksanaan Akreditasi

Akreditasi pondok pesantren dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditugaskan oleh Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Depag dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, guna mengumpulkan dan mengolah data serta menyimpulkan hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama maupun Menteri Pendidikan Nasional.

1. Komponen Akreditasi

Komponen akreditasi yang dinilai meliputi: administrasi/manajemen, organisasi /kelembagaan, sarana, perawatan keutuhan, kebersihan, dan kerapian sarana, peserta didik serta lingkungan/kultur pondok pesantren.

Komponen yang dievaluasi diatas memiliki beberapa sub komponen. Dan berdasarkan komponen dan sub komponen tersebut disusun indicator yang digunakan sebagai pedoman penilaian, yang mana indicator tersebut

dikategorikan sebagai input, proses, output dan outcome. Hubungan antara komponen, sub komponen, indicator, kategori dan responden ditentukan dengan kisi-kisi instrumen akreditasi.

2. Instrumen Akreditasi

Instrumen yang dimaksud adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden, yang setiap pertanyaan memiliki bobot nilai tersendiri. Instrumen ini disusun bersama-sama antara pemerintah melalui Depdiknas dan Depag, dan pondok pesantren.

Instrumen yang disusun memiliki kekhasan sebagai berikut:

- a. Disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen akreditasi pondok pesantren.
- b. Terdiri dari 8 komponen dengan beberapa item dan indicator.
- c. Instrumen dapat digunakan oleh berbagai jenis responden termasuk tim penilai. Perbedaannya hanya terletak pada nomor item yang harus dijawab.
- d. Dalam penilaian menggunakan pendekatan self evaluation.
- e. Setiap item memiliki bobot penilaian yang sama, dan setiap pilihan jawaban yang tersedia memiliki skor tersendiri.
- f. Karena memiliki skor tersendiri, maka memudahkan dalam melakukan analisis karena tidak memerlukan penghitungan statistik.

Adapun responden yang diberi pertanyaan meliputi:

- a. Badan Wakaf / Yayasan

Instrumen badan wakaf/yayasan yang di nilai adalah sejumlah 106 pertanyaan yang meliputi: administrasi/manajemen (11), organisasi

/kelembagaan (12), sarana (2), perawatan keutuhan, kebersihan, dan kerapian sarana(16), peserta didik (3) serta lingkungan/kultur pondok pesantren (5)

b. Pimpinan Pondok Pesantren

Instrumen pimpinan pondok pesantren yang di nilai adalah sejumlah 106 pertanyaan yang meliputi: administrasi/manajemen (11), organisasi/kelembagaan (11), sarana (25), perawatan keutuhan, kebersihan dan kerapian sarana (16), ketenagaan (ustadz dan karyawan) (5), peserta didik/santri (8), proses pembelajaran (1), lingkungan/kultur pondok pesantren (7), serta produk pondok pesantren (7)

c. Kepala Sekolah / Direktur

Instrumen Kepala Sekolah/direktur yang di nilai adalah sejumlah 106 pertanyaan yang meliputi: administrasi /manajemen (11), organisasi/kelembagaan (11), sarana (25), perawatan keutuhan, kebersihan dan kerapian sarana (16), ketenagaan (ustadz dan karyawan) (5), peserta didik/santri (8), proses pembelajaran (12), lingkungan/kultur pondok pesantren (9), serta produk pondok pesantren (7).

d. Orang Tua Santri / Masyarakat

Instrumen orang tua/masyarakat yang dinilai adalah sejumlah 99 pertanyaan yang meliputi: administrasi/manajemen (11), organisasi /kelembagaan (6), sarana (24), perawatan keutuhan, kebersihan dan kerapian sarana (16), ketenagaan (ustadz dan karyawan) (5), peserta didik (1), serta lingkungan / kultur pondok pesantren (8).

e. Ustadz / Guru

Instrumen ustadz/guru yang dinilai adalah sejumlah 106 pertanyaan yang meliputi: administrasi/manajemen (11), organisasi / kelembagaan (13), sarana (25), perawatan keutuhan, kebersihan dan kerapian sarana (16), ketenagaan (ustadz dan karyawan) (5), peserta didik /santri (8), proses pembelajaran (12), lingkungan /kultur pondok pesantren (9), produk pondok pesantren (7).

f. Karyawan

Instrumen karyawan yang dinilai adalah sejumlah 99 pertanyaan yang meliputi: administrasi/manajemen (11), organisasi / kelembagaan (7), sarana (25), perawatan keutuhan, kebersihan dan kerapian sarana (16), ketenagaan/ustadz dan karyawan (2), peserta didik /santri (4), lingkungan/kultur pondok pesantren (9).

g. Santri

Instrumen santri yang dinilai adalah sejumlah 99 pertanyaan yang meliputi: administrasi/manajemen (4), organisasi/kelembagaan(7), sarana (15), perawatan keutuhan, kebersihan dan kerapian sarana (16), ketenagaan/ustadz dan karyawan (1), peserta didik/santri (4), proses pembelajaran (11), lingkungan/kultur pondok pesantren (7).

3. Proses Akreditasi

Proses akreditasi pondok pesantren meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan akreditasi (tahap pertama)

Hal yang pertama kali dilakukan pihak pondok pesantren adalah mengajukan permohonan akreditasi ke Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Departemen Agama melalui Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam.

b. Penentuan tim akreditasi (tahap kedua)

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama melakukan verifikasi terhadap pondok pesantren yang mengajukan akreditasi dan menetapkan tim akreditasi yang akan melakukan penilaian.

c. Penentuan responden (tahap ketiga)

Tim Penilai bersama pimpinan pondok pesantren dan direktur/kepala madrasah menetapkan sample dari warga pondok pesantren yang akan dijadikan sebagai responden atau penjawab pertanyaan instrument. Adapun warga pondok pesantren yang harus diwakili terdiri dari:

1. Tim penilai (7 orang)
2. Badan wakaf/yayasan (2 orang)
3. Pimpinan pondok (2 orang)
4. Direktur/kepala madrasah (1 orang)
5. Orang tua / wali santri (1 orang tiap jenjang kelas)
6. Ustadz/guru (minimal 1 wakil kepala sekolah atau wakil direktur dan minimal 1 ustadz/guru mewakili setiap mata pelajaran)

7. Karyawan (minimal 1 orang mewakili jenis tugas tertentu, misalnya kelompok laporan, administrasi, pustakawan, petugas kebersihan dan lain sebagainya).
8. Santri (minimal 2 orang pengurus organisasi santri dan minimal 1 orang santri mewakili setiap rombongan belajar).

d. Pengumpulan data (tahap keempat)

Dalam pengumpulan data, tim penilai cukup membagikan instrument pertanyaan kepada seluruh responden. Dan pada saat responden menjawab pertanyaan yang ada, tim penilai dapat mewawancarai warga pondok pesantren, penggalan dokumen dan pengamatan terhadap jawaban pertanyaan yang diberikan kepada responden guna verifikasi data yang dikumpulkan.

e. Pengolahan data (tahap kelima)

Setelah data terkumpul, tim penilai bersama direktur/kepala sekolah serta ustadz/guru melakukan pengolahan serta analisis data dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

1. Memindahkan skor jawaban setiap responden pada tabel (lampiran 3), skor terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5
2. Menghitung rata-rata skor per-nomor pertanyaan/item (1) menurut kelompok responden.
3. Menghitung rata-rata skor per-komponen per-kelompok responden (2) berdasarkan rata-rata skor per-nomor pertanyaan/item (1)

4. Menghitung rata-rata skor komponen (3) berdasarkan rata-rata skor per-kelompok responden (2).
5. Hasil penghitungan (3) akan ditampilkan dalam bentuk grafik garis (lampiran 4).

f. Verifikasi data (tahap keenam)

Verifikasi data dilakukan oleh tim penilai. Yakni dengan melakukan pengolahan data dan analisis data seperti yang dilakukan pondok pesantren pada tahap ketiga.

Kemudian membandingkan hasil penghitungan (3) antara tim penilai dan pihak pondok pesantren, dengan toleransi perbedaan "1". Apabila terjadi perbedaan lebih dari "1", maka dilakukan verifikasi dan pembahasan dengan warga pondok pesantren hingga perbedaan maksimal sama dengan "1".

Setelah semua selesai dilakukan, selanjutnya tim penilai bersama pihak pondok pesantren menetapkan nilai akhir dengan menghimpun rata-rata skor komponen (3).

g. Pengambilan kesimpulan (tahap ketujuh)

Hasil kesimpulan kualitas pondok pesantren didapatkan dari hasil penghitungan rata-rata skor komponen (3). Kualitas pondok pesantren serta peringkat akreditasi ditentukan oleh:

Tabel. 3.1. Sekor Penilaian Akreditasi

Peringkat Akreditasi	Nilai Akreditasi	Rata-rata Skor Minimum Perkomponen	Skor rata-rata minimum C, D, E
Disetarakan	Sangat Baik	3	4,3 – 5
Disetarakan	Baik	3	3,7 – 4,2
Disetarakan	Cukup	3	3 – 3,6
Belum dapat disetarakan	Kurang	<3	<3

Keterangan:

1. C : Sarana
2. D : Ketenagaan (ustadz/karyawan)
3. E : Proses Pembelajaran

h. Penyusunan laporan (tahap kedelapan)

Dalam penyusunan laporan harus mencantumkan identitas lembaga pendidikan pondok pesantren, waktu penilaian, tim penilai, jenis dan jumlah responden, rata-rata skor per-komponen, profil pondok pesantren dalam wujud grafis seperti terlihat pada lampiran 4, kesimpulan serta rekomendasi

4. Penetapan Status dan SK Akreditasi

Setelah proses penilaian dan penetapan status, Pondok Pesantren yang mendapatkan status disetarakan dengan SMU akan mendapatkan Surat Keputusan dari Mendiknas dan Depag tentang status Pondok Pesantren yang disetarakan tersebut²⁹. Derajat akreditasi pondok pesantren dipresentasikan dengan huruf A, B, dan C, dengan catatan kesetaraan dengan nilai C berarti

²⁹ Contoh: SK Dirjen Binbaga Islam, No: E.IV/PP.03.2/KEP/64/98, SK Mendiknas No: 105-106/0/2000, SK Mendiknas No: 096/0/2002, SK. Mendiknas No: 240/C/KEP/MN/2003, SK Mendiknas No: 25/C/Kep/MN/2005 tentang penyeteraan KMI/TMI pondok pesantren dengan SMA/MA.

belum disetarakan³⁰. Dan direkomendasikan untuk memperbaiki instrument yang dinilai apabila dalam akreditasi mendapatkan nilai yang belum mencukupi.

Kemudian Depdiknas dan Depag membuat surat rekomendasi kepada seluruh Perguruan Tinggi baik negeri maupu swasta tentang penyetaraan ijazah bagi pondok pesantren mu'addalah, bahwa bagi santri lulusan pondok pesantren tersebut dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi dengan tanpa mengikuti ujian nasional.

C. Akreditasi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta

Gerakan reformasi di Indonesia yang dimulai dengan tumbangnya Rezim Orde Baru pada tahun 1998, tampaknya memberikan angin segar bagi dunia pendidikan, terutama pada pondok pesantren. Terlebih dengan lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, merupakan tantangan baru sekaligus menjadi peluang bagi berkembangnya madrasah.

Pondok Pesantren Ta'mirul Islam di akreditasi pada tahun 2003, kemudian dilanjutkan dengan mu'adalah dengan Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 2008. Untuk lebih jelasnya, akreditasi pondok pesantren Ta'mirul Islam telah melahirkan beberapa surat keputusan maupun edaran dari instansi terkait sebagaimana berikut:

³⁰ Dirjen Dikdasmen Depdiknas, Pedoman Penyetaraan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah setara dengan SMU, tidak dipublikasikan.

1. SK Mendiknas tanggal 2 Juni 2003 no: 240/C/KEP/MN/2003, tentang pengakuan Kulliyatul/Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (KMI/TMI) Pondok Pesantren Setara dengan Sekolah Umum.
2. SK Dirjen Bagais No: Dt.II/PP-01.1/AZ/9/2002 tanggal 26 Nopember 2002 tentang Status Mu'adalah (setara) Madrasah Aliyah/SMA selama 4 tahun pada Pendidikan Pondok Pesantren.
3. Surat Dirjen Diknasmen Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 April 2004 No: 2414/C/MN/2004, kepada Rektor Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia tentang Pengakuan KMI/TMI/MMI unuk masuk Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan tanpa mengikuti Ujian Nasional.
4. Surat Dirjen Diknasmen Departemen Pendidikan Nasional tanggal 3 Mei 2005, No: 2282/C.C4/MN/2005, kepada Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta, tentang Status Tamatan 17 lembaga KMI/TMI Pondok Pesantren dalam melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Negeri / Swasta.
5. Surat Keputusan Mu'adalah dengan Universitas Al-Azhar Mesir pada tanggal 31 Maret 2008.
6. Surat Edaran Dirjenbagais Departemen Agama Republik Indonesia, nomor: DJ.I/PP.00.7/940/2008, tanggal 29 Juli 2008 tentang Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah.
7. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam, No: DJ.I/286/2009, tanggal 20 Mei 2009 tentang Penetapan Perpanjangan Status Mu'addalah (SETARA) Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah/SMA.

BAB IV
ANALISIS AKREDITASI PONDOK PESANTREN
TA'MIRUL ISLAM SURAKARTA SERTA PENGARUHNYA

A. Pengaruh Akreditasi Secara Internal

1. Peserta Didik / Santri dan Wali Santri

Pada awal akreditasi, memang banyak kendala yang dihadapi oleh pihak pondok pesantren. Terutama dari para wali santri yang merasa keberatan karena takut putra maupun putri yang mereka pondokkan tidak dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal ini terjadi karena setelah pondok pesantren Ta'mirul Islam melakukan akreditasi, tidak lagi mengikutkan santrinya melaksanakan Ujian Negara (UN) sebagaimana sebelumnya diikutkan melalui Madrasah Aliyah Ta'mirul Islam, yang secara resmi di non-aktifkan pada tahun 2003 setelah KMI Ta'mirul Islam mendapatkan kesetaraan ijazah pada tahun 2003.

Setelah dilakukan dialog secara intensif antara pihak pengasuh pondok pesantren dan wali santri, akhirnya para wali santri dapat memahami pentingnya akreditasi yang dilakukan oleh pengasuh pondok serta dampaknya bagi para alumni.

Sesuai dengan tujuan akreditasi pondok pesantren secara umum³¹, yakni:

- a. Mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren melalui:

³¹ Dirjen Dikdasmen Depdiknas, *Pedoman Penyetaraan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah setara dengan SMU*, tidak dipublikasikan

- 1) Terjaganya kurikulum khas pondok pesantren
 - 2) Ketersediaan tenaga kependidikan yang cukup, kualitas dan kuantitasnya.
 - 3) Ketersediaan sarana/prasarana pendidikan yang memadai.
 - 4) Pelaksanaan administrasi pendidikan yang baik.
- b. Mendorong tercipta dan terpeliharanya ketahanan pondok pesantren dan lingkungannya.
- c. Mendapatkan bahan-bahan bagi perencanaan dalam rangka pembinaan pondok pesantren yang bersangkutan
- d. Melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab.
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu pendidikan pondok pesantren.
- f. Memudahkan pengaturan mutasi murid/siswa/santri.

Proses akreditasi yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, dengan disetarakannya ijazah yang dikeluarkan oleh pihak pondok sesuai SK Mendiknas No. 240/C/KEP/MN/2003, membawa dampak pada semakin mantapnya para wali santri untuk tetap menyekolahkan putra dan putrinya di pondok pesantren Ta'mirul Islam.

Pengaruh tersebut dapat dilihat pada pertambahan jumlah santri yang cukup signifikan dari tahun ketahun sejak berdirinya pondok pesantren Ta'mirul Islam pada tahun 1986, seiring dengan semakin meningkatnya kualitas yang mereka harapkan dalam pendidikan putra

putri di KMI pondok pesantren Ta'mirul Islam dalam mencetak kader-kader agama dan bangsa.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren Ta'mirul Islam seiring dengan akreditasi yang dilakukan pada tahun 2003 dengan disetarakannya ijazah yang dikeluarkan oleh pondok dengan tanpa mengikuti Ujian Nasional, dapat dilihat pada jumlah pendaftar santri baru serta santri keseluruhan dari tahun ketahun pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Daftar Jumlah Santri
Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta

S I S W A	TAHUN PEL - AJARAN	KELAS								
		1	2	3	1 Tks	3 Tks	4	5	6	Jml
Jumlah Siswa	2004 / 2005	104	79	71	30	29	49	54	48	460
	2005 / 2006	109	84	75	34	27	48	56	46	487
	2006 / 2007	120	90	84	35	28	52	80	52	545
	2007 / 2008	130	120	96	26	18	53	68	56	567
	2008 / 2009	145	135	98	35	25	65	65	72	640
Jumlah Rombel	2004 / 2005	5	4	2	2	2	2	2	2	21
	2005 / 2006	5	4	2	2	2	2	2	2	21
	2006 / 2007	6	4	4	2	2	2	2	2	24
	2007 / 2008	6	4	4	2	2	2	2	2	24
	2008 / 2009	6	4	4	2	2	2	2	2	24

Sumber : Arsip TU PPTI 2009

Dengan mengacu pada tabel diatas, dapat dilihat bagaimana peningkatan jumlah santri di pondok pesantren Ta'mirul Islam Surakarta secara bertahap setelah program akreditasi dilakukan pada tahun 2003.

2. Tenaga Pendidik (Ustadz/Ustadzah³²)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik professional³³ dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³⁴

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia yang salah satu visinya mewujudkan system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Visi seorang guru adalah terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh

³² Ustadz adalah sebutan bagi guru laki-laki dalam bahasa Arab, sedangkan ustadzah adalah guru perempuan. Lihat: Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 23.

³³ Pendidik professional adalah pendidik yang memiliki kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Lihat : Depag RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. (Dirjen Pendis Depag RI: Jakarta, 2006), hal. 35.

³⁴ Depag RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14* hal. 2.

sertifikat pendidik³⁷. Dengan sertifikat pendidik ini diharapkan seorang guru akan memperoleh tunjangan profesi³⁸ berupa penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan peluang emas bagi pengembangan pesantren. Pasalnya, UU tersebut menghapus diskriminasi terhadap pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini. Konkretnya, pendidikan diniyah dan pesantren diakui sebagai bentuk pendidikan keagamaan (pasal 30 ayat 4).

Hal ini dikuatkan lagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang disahkan bertepatan dengan Hari TNI (5 Oktober 2007). Peraturan Pemerintah ini menjadi instrumen pengembangan dan akomodasi pesantren dalam kebijakan pemerintah.

Kecenderungan aparat birokrasi pendidikan meminggirkan pesantren dari arus utama kebijakan selama ini tidak sah lagi diteruskan. Dukungan kebijakan dan pendanaan untuk pendidikan diniyah dan pesantren pun akan lebih besar daripada sebelumnya. Alumni pendidikan diniyah dan pesantren akan mendapat perlakuan dan pengakuan yang sama

³⁷ Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Lihat : Depag RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14* hal.3.

³⁸ Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Lihat : Depag RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14* hal.37.

dengan alumni pendidikan umum. Artinya, kesinambungan pendidikan dan kiprah kemasyarakatan alumni pesantren tidak akan terhalang hanya karena yang bersangkutan tidak pernah mengenyam pendidikan umum atau memiliki ijazah "pendidikan formal".

Melalui program sertifikasi guru dalam jabatan yang mulai digulirkan oleh pemerintah pertama kali pada tahun 2006, pondok-pondok pesantren yang telah diakreditasi, baik oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama telah mendaftarkan dan mengikutsertakan para guru/ustadz dari pondok pesantren mu'adalah untuk ikut dalam program tersebut.

Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, sejak tahun 2007 telah mengikutsertakan para guru/ustadz-nya sebanyak 26 dari 90 orang guru (lihat daftar guru dalam lampiran) dalam program sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan profesionalitas masing-masing. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Tabel 4.2 Daftar Guru Lulus Sertifikasi
KMI Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta

NO	N A M A	LPTK	MATERI	TAHUN LULUS
1	SAMADI, S.Ag	IAIN Walisongo	Fiqh	31 Des 2007
2	M. W. TAMAMI, SH	IAIN Walisongo	Bhs. Arab	31 Des 2007
3	ABDULLAH MAHFUDZ, S.Ag	IAIN Walisongo	Fiqh	31 Des 2007
4	JUMARI, S.Ag	IAIN Walisongo	Qur'an Hadits	31 Des 2007
5	MERNAWATI, S.Pd.I	IAIN Walisongo	Fiqh	31 Des 2007
6	SUWARTO, S.Ag	IAIN Walisongo	Bhs. Arab	31 Des 2007
7	SUWARDI, S.Ag	IAIN Walisongo	Bhs. Arab	31 Des 2007
8	MOH. ADHIM, M.Pd	IAIN Walisongo	Bhs. Arab	31 Des 2007
9	AGUS SETIO BUDHI, S.Ag	IAIN Walisongo	Bhs. Arab	31 Des 2007
10	ETIK KURNIASIH, S.Th.I	IAIN Walisongo	Qur'an Hadits	31 Des 2007
11	TAUFIK SALEH, S.H.I	IAIN Walisongo	Bhs. Arab	31 Des 2007
12	MOHAMAD HALIM, SH	IAIN Walisongo	Fiqh	19 Feb 2008
13	PRILIA NUGRAHENI, SE	UNS Surakarta	Ekonomi	30 Mei 2008
14	Dra. MAEMUNAH	UNS Surakarta	IPS	14 Juni 2008
15	YUNUS DARMAWAN, S.Pd	UNS Surakarta	Matematika	14 Juni 2008
16	AGUS PRAYITNO, S.Pd	UNS Surakarta	Materi Umum	14 Juni 2008
18	Dra. SITI LESTARI RN	UNS Surakarta	Matematika	30 Des 2008
22	WIWIN KUSTIYANI, S.Pd	UNS Surakarta	Bahasa Inggris	30 Des 2008
23	DENTA MUKAROMI, SE	UNS Surakarta	Ekonomi	30 Des 2008
20	INDAH WAHYUNI, S.Pd	UNS Surakarta	Fisika	14 Jan 2009
21	SURONO, S.Pd	UNS Surakarta	Biologi	14 Jan 2009
17	SUNARDI, S.Th.I.	IAIN Walisongo	Qur'an Hadits	28 Feb 2009
19	MUCH. WILDAN H., S.Ag	IAIN Walisongo	Bhs. Arab	28 Feb 2009
24	SUPRIYONO, S.Pd.I.	IAIN Walisongo	Fiqh	28 Feb 2009
25	MUHAMMAD SOLEH, S.S.	IAIN Walisongo	Bhs. Arab	28 Feb 2009
26	MUH. ZUHAL AR, Lc	IAIN Walisongo	SKI	28 Feb 2009

Sumber : Arsip TU PPTI 2009

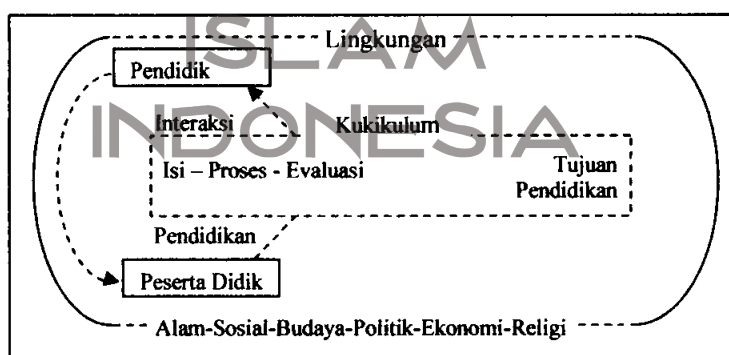
3. Kurikulum

Konsep kurikulum telah berkembang sejak lama seiring dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Dalam pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata-mata pelajaran yang harus

disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Konsep ini telah ada sejak zaman Yunani Kuno.³⁹

Undang-Undang No 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁴⁰

Dengan berpedoman pada kurikulum, interaksi pendidikan antara guru dan siswa berlangsung. Interaksi ini tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi selalu terjadi dalam lingkungan tertentu, yang mencakup antara lain lingkungan fisik, alam, sosial budaya, ekonomi, politik, dan religi. Pertautan antara satu komponen dan komponen pendidikan lainnya menurut Nana Syaodih Sukmadinata⁴¹ dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 4.1 Komponen-Komponen Utama Pendidikan
Sumber : Nana Syaodih Sukmadinata, 1997.

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, Prof. DR. *Pengembangan Kurikulum – Teori dan Praktek*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 4.

⁴⁰ Depag RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14*, hal. 47.

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinata, Prof. DR. *Pengembangan Kurikulum* hal. 3.

Dengan melihat bagan diatas kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pengarah segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan serta merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan.

Disamping kedua fungsi itu, kurikulum juga merupakan suatu bidang studi, yang ditekuni oleh para ahli atau spesialis kurikulum, yang menjadi sumber konsep-konsep atau memberikan landasan-landasan teoritis bagi pengembangan kurikulum berbagai institusi pendidikan.

Pasal 30 UU No 20 Tahun 2005 tentang system Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pemerintah mengakui pondok pesantren sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan di Indonesia baik yang menyelenggarakan program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Hal ini juga dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 14 dan pasal 26.

Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan non formal, dalam menentukan kurikulum harus mengacu pada pasal 18 PP. No. 55 Tahun 2007. yaitu memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.

Kurikulum yang dikembangkan oleh pondok pesantren harus dikembangkan dengan prinsip diversifikasi⁴² sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.⁴³

Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta dengan lembaga pendidikannya Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (KMI), memiliki kurikulum yang menggabungkan antara kurikulum dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan Muatan Lokal Pondok Pesantren Ta'mirul Islam yang mengedepankan pendidikan Al-Qur'an dan Bahasa. Kurikulum tersebut dapat dilihat pada lampiran tesis ini.

Hal ini diharapkan agar alumni Pondok Pesantren Ta'mirul Islam memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, berpikiran bebas dengan tidak meninggalkan tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mufaqiqh fiddin) dan menjadi muslim yang memiliki ketrampilan/keahlian guna membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.

Dengan kurikulum yang diterapkan ini, menjadikan santri yang belajar di Kulliyatul Mu'allimin/at Al-Islamiyyah (KMI) Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, tidak mengikuti Ujian Nasional yang

⁴² Pengembangan kurikulum secara diversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Lihat: Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴³ Depag RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14*, hal. 84.

diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, tetapi pihak pondok pesantren menyelenggarakan sendiri Ujian Akhir Kepondokan.

Ujian akhir tersebut diselenggarakan dua gelombang, yang tidak hanya mewajibkan seorang santri lulus 5 atau 6 mata pelajaran tertentu saja, tetapi semua mata pelajaran (sebanyak 37 – 38 mata pelajaran) yang diujikan harus lulus semua. Setelah lulus semua mata pelajaran tersebut, seorang santri juga dituntut untuk lulus ujian Al-Qur'an, micro teaching, berakhlak mulia.

Penerapan kurikulum di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam ini dipandang oleh para pengasuhnya sangat efektif. Karena seorang santri akhir apabila diikutkan Ujian Nasional, maka ia hanya focus belajar 5 atau 6 materi tersebut saja, dengan mengenyampingkan materi lainnya lebih-lebih materi kepondokan yang menjadi tujuan utama seorang santri belajar ke pondok pesantren.

Hal ini terjadi pada saat Pondok Pesantren Ta'mirul Islam belum diakreditasi dengan mengikutkan santrinya EBTA/EBTANAS Madrasah Aliyah. Para santri setelah mengikuti ujian tersebut tidak lagi focus pada ujian akhir kepondokan. Mereka merasa sudah lulus dari pondok karena sudah mengikuti EBTA/EBTANAS.

Disamping hal tersebut diatas, dengan mengikutkan santri Ujian Nasional, seakan-akan yang berhak meluluskan seorang santri dari pondok pesantren adalah pemerintah yang notabene tidak mengetahui apa-apa tentang santri tersebut. Walaupun dalam aturan yang berhak meluluskan

adalah pihak sekolah, tetapi peran hasil Ujian Nasional sangatlah dominan terhadap kelulusan santri/siswa. Seorang siswa/santri dinyatakan tidak lulus pada jenjang pendidikan menengah dan atas manakala ia tidak lulus Ujian Nasional.

Akreditasi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam yang dilakukan pada tahun 2003, dengan hasil dikeluarkannya Surat Keputusan Mendiknas No. 240/C/KEP/2003, bahwa alumni Pondok Pesantren Ta'mirul Islam disetarakan dengan SMU. Memberikan ruang yang cukup luas bagi pihak pondok pesantren dalam mengembangkan kurikulum yang ada guna menyiapkan santrinya dalam membangun kehidupan yang Islami di masyarakat setelah mereka dinyatakan lulus dari pondok pesantren.



4. Sarana dan Prasarana

Bab VII Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, habis pakai, serta perlengkapan yang diperlukan guna menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkesinambungan.⁴⁴

Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit

⁴⁴ Depag RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14*, hal. 124.

produksi, ruang kantin, instansi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Karena pentingnya sarana dan prasarana, satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus, wajib menyediakan akses kesarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Guna melengkapi sarana dan prasarana yang ada, Pondok Pesantren Ta'mirul Islam berusaha bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mewujudkan sarana prasarana yang memadai seiring dengan terus meningkatnya jumlah santri setiap tahunnya.

Adapun sarana dan prasarana yang telah dapat diwujudkan setelah dilakukannya akreditasi tahun 2003 antara lain:

- a. Laboratorium IPA
- b. Perpustakaan
- c. Pembangunan Gedung Salam Rahmah dan Dwi Windu
- d. Perluasan tanah wakaf di Sragen
- e. Pendirian BKSM

Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Data Sarana & Prasarana
Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta

NO	JENIS RUANGAN	JUMLAH		LUAS (M ²)	KONDISI	
		Putra	Putri		BAIK	RUSAK
1	Kantor Yayasan	1		30 m ²	2	-
2	Pimpinan Pondok	1		30 m ²	2	-
3	Direktur	1	1	30 m ²	2	-
4	Guru / Ustadz	1	1	30 m ²	2	-
5	Tata Usaha	1	1	30 m ²	2	-
	BP / Pengasuhan Santri	1	1	30 m ²	2	-
6	Asrama Santri	12	20	30 m ²	32	-
7	Kelas / Teori	14	14	40 m ²	24	-
8	Laboratorium					
	a. Lab. IPA	1		30 m ²	2	-
	b. Lab. Komputer	1	1	30 m ²	2	-
	c. Lab. Bahasa	-	-	-	-	-
9	Perpustakaan		1	50 m ²	1	-
10	Keterampilan	1	1	20 m ²	4	-
11	Kesenian	1	1	30 m ²	2	-
12	OSIS	1	1	10 m ²	2	-
13	Ibadah	1	1	100 m ²	2	-
14	Lapangan Olahraga					
	a. Basket	1	1	50 m ²	2	-
	b. Badminton	1		60 m ²	1	-
	c. Futsal	1	-	90 m ²	1	-
	d. Takraw	1		60 m ²	1	-
	e. Pingpong	1	1	60 m ²	2	-
15	Gedung serbaguna	1	1	100 m ²	2	-
16	Ruang Makan	1	1	80 m ²	2	-
17	WC / Toilet Santri	10	15	4 m ²	25	-
18	WC / Toilet Guru	4	4	4 m ²	8	-
19	Kamar Mandi Santri	24	20	4 m ²	24	-
20	Kamar Mandi Guru	4	4	4 m ²	8	-
21	Dapur	1		15 m ²	1	-
22	UKS / BKSM	1		20 m ²	1	-
23	Kantin / Koperasi / Waserda	2	3	25 m ²	5	-

Sumber: Arsip TU PP Ta'mirul Islam 2008/2009

5. Administrasi

Salah satu komponen pesantren yaitu seorang Kyai sebagai sentral figur, otoritatif, dan pusat seluruh kebijakan dan perubahan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini sangat erat kaitanya dengan dua faktor, yakni:

- a. Kepemimpinan yang tersentralisasi pada individu yang bersandar pada karisma serta hubungan yang bersifat paternalistik.
- b. Kepemilikan pesantren bersifat individual (keluarga), bukan komunal⁴⁵

Karena dua faktor tersebut, maka kebanyakan pesantren menganut pola “serba-mono”, mono manajemen dan mono-administrasi sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit-unit yang ada dalam organisasi. Kemudian karena otoritas individu kyai sebagai pendiri sekaligus pengasuh pesantren sangat besar dan tidak bisa diganggu gugat. Maka faktor nasab / keturunan juga sangat kuat, sehingga kyai bisa mewariskan kepemimpinan pesantren kepada ahli warisnya yang dipercaya tanpa ada komponen pesantren yang dapat menolaknya.

Hasilnya adalah banyak pesantren yang ketika kyainya masih hidup berkembang dengan pesat, tetapi tumbang ditengah jalan karena ahli waris/ keturunannya yang menggantikannya tidak mempunyai kapabilitas sebagai seorang kyai yang terdahulu.

Sejalan dengan perkembangan zaman, beberapa pesantren mengalami perkembangan pada aspek manajemen, organisasi, dan

⁴⁵ Khusnurdilo, Moh. Drs. M.Pd, Mashudi, Shulton Muhammad, Drs. MPd. *Manajemen Pondok Pesantren*. (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), hal. 14

administrasi pengelolaan keuangan. Perubahan ini dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan; dari karismatik ke rasionalistik, dari otoriter-paternalistik ke diplomatik-partisipatif, atau dari *laissez faire* ke demokratis.⁴⁶ Sebagai contoh kasus adalah, Dewan Kyai di Pesantren Tebuireng Jombang, Badan Wakaf di Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Dewan Masyayikh di Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta.

Dengan didirikannya badan atau dewan dalam kepemimpinan pesantren, pusat kekuasaan sedikit terdistribusi di kalangan elit pesantren dan tidak terlalu terpusat pada kyai. Hal ini merupakan pengaruh sistem pendidikan formal yang diadakan di pesantren yang menuntut kejelasan pola hubungan dan pembagian kerja diantara unit-unit kerja.

Manajemen pendidikan formal mensyaratkan bahwa sebuah lembaga pendidikan dapat dikatakan baik administrasinya, manakala lembaga tersebut memiliki administrasi program pengajaran, tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perpustakaan, siswa, dan hubungan lembaga dengan masyarakat yang baik.⁴⁷

Dalam bidang administrasi, pondok pesantren Ta'mirul Islam mengikuti administrasi modern, non klasik. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi yang ada pada pondok pesantren Ta'mirul Islam, dan

⁴⁶ Khusnurdilo, Moh. Drs, M.Pd, Mashudi. Shuiton Muhammad, Drs, MPd. *Manajemen* hal. 15

⁴⁷ Depag RI, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Isla, *Pedoman Akreditasi* hal. 64.

sarana dan prasarana yang dimilikinya yang kesemuanya dipimpin oleh seseorang yang berkompeten dibidangnya.

Disamping hal itu semua, tentunya dari hasil akreditasi itu sendiri, yakni dengan disetarakannya ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren Ta'mirul Islam dengan SMA/SMU dapat menjadi pedoman, bahwa administrasi yang ada di pondok tersebut adalah baik.

6. Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan hal yang diharapkan setelah akreditasi dilakukan. Lembaga tertinggi dalam organisasi adalah Yayasan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, sebuah badan legislative yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan perkembangan pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam. Tugas dan kewajiban keseharian dari lembaga ini dijalankan oleh Pimpinan Pondok.

Pimpinan Pondok adalah mandataris Yayasan yang mendapatkan amanah untuk menjalankan keputusan-keputusan yayasan dan bertanggung jawab kepada yayasan. Dalam menjalankan kepemimpinannya, pimpinan pondok dibantu oleh Dewan Masyayikh. Yang dibentuk pada tahun 2004.

Dewan Masyayikh merupakan kepanjangan tangan dari Pimpinan Pondok, yang bertugas⁴⁸ :

- a. Merumuskan kebijakan-kebijakan makro pondok,
- b. Merumuskan anggaran pendapatan dan belanja,

⁴⁸ Sekretariat Pondok Pesantren Ta'mirul Islam. *Buku Pegangan Ustadz/Ustadzah Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah Pondok Pesantren Ta'mirul Islam*. Tidak dipublikasikan, 2007. Hal. 7

- c. Mengusulkan, menyeleksi, mengangkat, mengevaluasi dan memberhentikan ustadz/ustadzah dan karyawan pondok,
- d. Melakukan pembinaan kepada setiap coordinator bagian

Menindaklanjuti usulan Research and Developmen

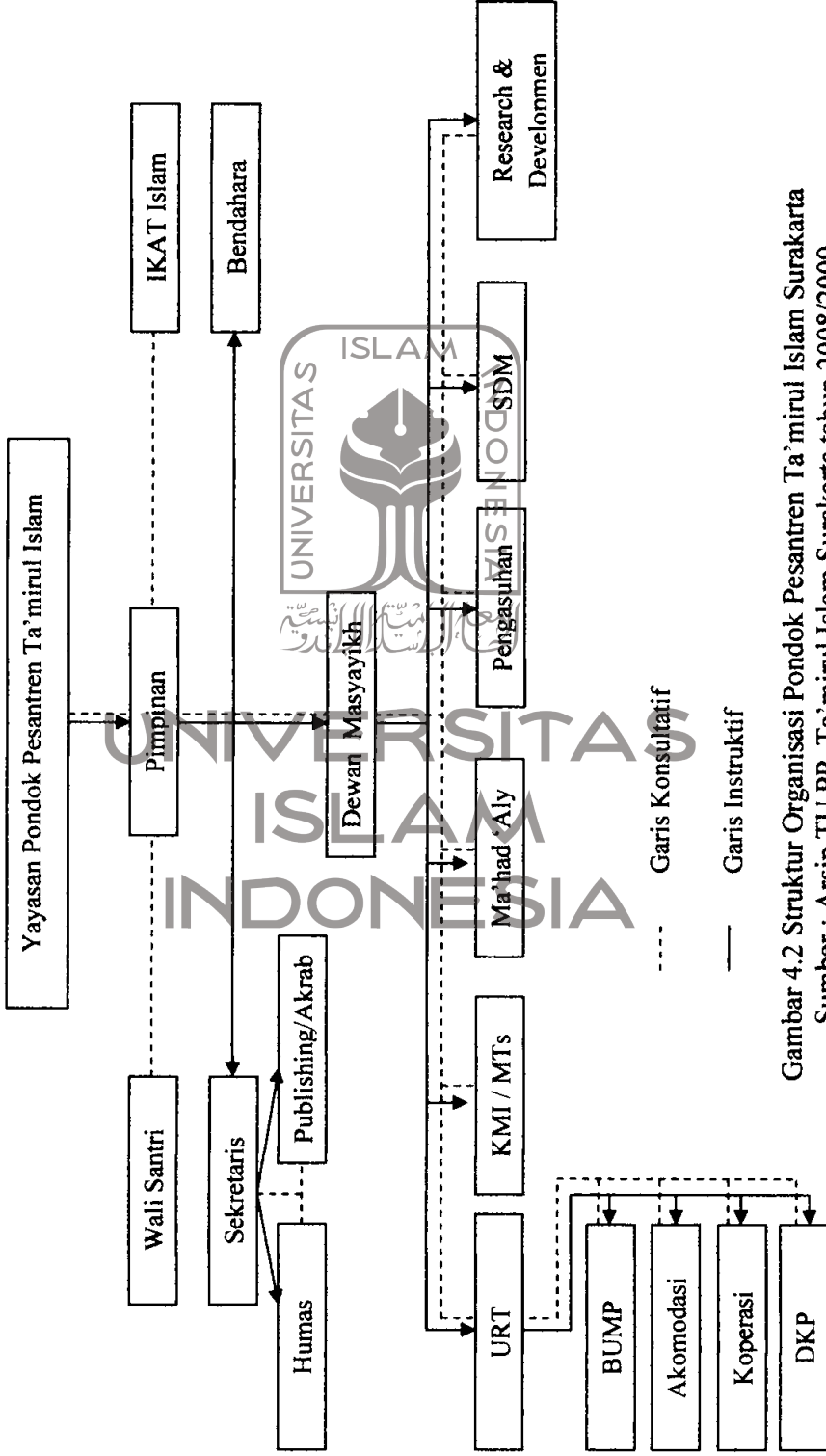
Dewan Masyayikh ini kedudukannya sangat penting, sebab orang-orang yang termasuk dalam di dalamnya merupakan pimpinan-pimpinan dari lembaga-lembaga yang ada di bawah pimpinan pondok. Walaupun merupakan tangan kanan pimpinan, semua keputusan dewan masyayikh diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan pondok untuk dapat tidaknya dijalankan.

Adapun lembaga-lembaga yang di bawah oleh pimpinan pondok adalah sebagai berikut:

- a. Bagian sekretariat dan administrasi
- b. Dewan Masyayikh
- c. Direktur KMI Ta'mirul Islam, Kepala MTs. Ta'mirul Islam
- d. Direktur Ma'had 'Aly Ta'mirul Islam
- e. Pengasuhan Santri
- f. Direktur Urusan Rumah Tangga
- g. Direktur Sumber Daya Manusia
- h. Direktur Research and Developmen

Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi di pondok pesantren Ta'mirul Islam dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
PONDOK PESANTREN TA'MIRUL ISLAM
SURAKARTA**



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta
Sumber : Arsip TU PP. Ta'mirul Islam Surakarta tahun 2008/2009

B. Pengaruh Akreditasi Secara Eksternal

1. Alumni

Salah satu tujuan dari akreditasi, yakni mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan dengan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melindungi masyarakat dari usaha pendidikan yang kurang bertanggung jawab serta menyiapkan output yang berguna bagi masyarakat.

Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, menerapkan beberapa criteria bagi para alumninya setelah menyelesaikan semua proses belajar mengajar, yakni melalui:

a. Standar Kelulusan Santri

Bahwa seorang santri yang melaksanakan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Ta'mirul Islam harus dapat menyelesaikan proses studinya dengan menyelesaikan semua Ujian Akhir Pondok (putra: 37 mata pelajaran, putri: 38 mata pelajaran) dengan standar kelulusan santri sebagai berikut :

Tabel 4.4 Standar Kelulusan Santri
KMI Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta

- 1) Lulus semua mata pelajaran dengan nilai minimal:

NO	PELAJARAN	NILAI MIN	NO	PELAJARAN	NILAI MIN
1	Al-Qur'an	6	20	Dinul Islam	4
2	Tajwid / Tahsin / Ghoroib	4	21	Tarikh Islam / Ski	4
3	Tafsir	4	22	Tarbiyah	4
4	Hadits	4	23	Khot / Ketrampilan	5
5	Mustholah Hadits	4	24	Matematika	5
6	Faroidl	4	25	Ips Ekonomi - Akuntansi	4,5
7	Tarjamah	4	26	Ips Sejarah	4
8	Tamrin Lughoh	5	27	Ips Geografi	4
9	Nahwu	5	28	Bahasa Indonesia	5
10	Shorof	5	29	Bahasa Inggris	5
11	Balaghoh	4	30	Grammar	5
12	Insyah	5	31	Fisika	4,5
13	Imla	4	32	Kimia	4,5
14	Mutholaah	5	33	Biologi	4,5
15	Mahfuzhot	4	34	Sejarah Umum Nasional	4
16	Fiqh	6	35	Tata Negara	4
17	Ushul Fiqh	4	36	Sosiologi - Antropologi	4
18	Aqidah Akhlak	6	37	Amaliyah Tadris	5
19	Ulumul Qur'an	4	38	Nisaiyyah	5

Sumber : Arsip TU PP. Ta'mirul Islam 2008/2009

- 2) Nilai rata-rata semua mata pelajaran yang diujikan (37: putra, putri:
38) adalah minimal 4,5
- 3) Apabila nilai rata-rata semua pelajaran tercapai, nilai rumpun mata pelajaran bahasa Arab (bahasa Arab/tamrin, Nahwu, shorof, insya, muthola'ah) serta nilai rumpun pelajaran nasional (matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris) tidak tercapai, maka dilakukan ujian susulan.

- 4) Lulus Ujian Al-Qur'an dengan menghafal surat-surat pilihan, yakni: Juz 'Amma, surat al-Kahfi, al-Waqi'ah, al-Jum'ah, ad-Dukhon, Yaasin, ar-Rohman, as-Sajdah, al-Mulk.
- 5) Lulus Ujian Lissan yang terdiri dari mata pelajaran: Al-Qur'an (tajwid, tahfidz, ghoroi'ul qiro'ah), bahasa arab (insya', muthola'ah, nahwu, shorof, tarjamah, mufrodah, balaghoh), fiqh (ibadah amaliyah, ibadah qauliyah, do'a-do'a, ushul fiqh), bahasa Inggris (reading, writing, transliting, grammer, vocabulary) dengan nilai minimal 5 setiap rumpun pelajaran.
- 6) Lulus Amaliyat Tadris (micro teaching) dengan nilai minimal 5
- 7) Membuat karya tulis dengan menggunakan bahasa Arab atau Inggris dengan mengambil judul permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

b. Pengabdian masyarakat

Salah satu syarat yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Ta'mirul Islam adalah bahwa apabila seorang santri akan mengambil Ijazah Pondok, santri tersebut harus dapat menunjukkan bukti bahwa ia telah melaksanakan pengabdian selama 1 (satu) tahun. Pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan di pondok pesantren induk, cabang, menjadi ta'mir masjid, mengajar TPA, MDA, atau lainnya yang sifatnya adalah pendidikan dan dakwah di masyarakat.

Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang merupakan kelanjutan daripada semua proses program belajar mengajar selama di

pondok pesantren. Apabila di pondok pesantren yang menilai adalah dewan asatidz, tetapi dalam pengabdian masyarakat, masyarakatlah yang akan menilai santri tersebut secara langsung.

Dari program ini diharapkan bahwa alumni yang baru lulus untuk lebih focus terlebih dahulu terhadap tanggung jawabnya terhadap ilmu yang telah diperolehnya selama di pondok pesantren, dengan mempraktekkan atau mengajarkannya pada masyarakat. Sebab apabila mereka langsung melanjutkan studinya ke Perguruan Tinggi, di khawatirkan mereka melupakan ilmu yang telah didapat dengan susah payah di pondok pesantren karena lebih memfokuskan diri pada perguruan tingginya.



c. Studi lanjut

Salah satu poin terpenting dari program akreditasi pondok pesantren adalah diterima/diakunya lulusan/alumni dari pondok-pondok pesantren oleh pemerintah untuk dapat melanjutkan studi ke PTN/PTS yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo yang merupakan embrio pertama dari program akreditasi pesantren, sampai tahun 1998, ijazah yang dikeluarkan tidak mendapat pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia, baik dari Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama. Hal ini karena kurikulum yang diterapkan di sana tidak mengikutkan santrinya dalam EBTA/EBTANAS/UN/UNAS yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam sisi yang lain, ijazah yang dikeluarkan oleh pihak pondok pesantren tersebut di akui dan diterima oleh Negara atau Perguruan Tinggi Luar Negeri, yakni dengan¹⁹:

- 1) Menteri Pendidikan dan Pengajaran Republik Arab Mesir tahun 1957 menetapkan persamaan Ijazah KMI Gontor dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas Mesir dengan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kebudayaan Departemen Luar Negeri No. 18, No. Surat 1021/0/1, tanggal 13 Juni 1957. Bagi pemegang ijazah KMI diperbolehkan mendaftarkan diri pada Universitas di Mesir.
- 2) Mu'adalah (persamaan) Universitas al-Azhar, Mesir tahun 1986. Mu'adalah tersebut diperbarui tahun 1996 dan 2002.
- 3) Ketetapan Kementerian Pengajaran Kerajaan Saudi Arabia tahun 1387/1967 bahwa ijazah KMI Gontor disamakan dengan ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas di Saudi Arabia. Persamaan ini berdasarkan keputusan Menteri Pengajaran No. 4/3/38/4459 tanggal 16/6/1387. SK ini diperbarui tahun 2000.
- 4) Pengakuan dari University of the Punjab, Lahore, bahwa pemegang ijazah KMI dapat meneruskan pendidikan di lingkungan Universitas ini, melalui keputusan tertanggal 24 Agustus 1991.

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah akhirnya juga mengakui lulusan/alumni dari pondok pesantren Gontor untuk dapat

¹⁹ <http://www.gontor.co.id>. Di akses pada tanggal 3 Mei 2009 pukul 10.23.

melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Indonesia. Dengan Surat Keputusan Dirjenbinbaga Islam, Departemen Agama, Nomor E.IV/PP.03.2/KEP/64/98, dan Departemen Pendidikan Nasional dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 105/O/2000.

Akreditasi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam yang dilakukan pada tahun 2003, dengan SK Mendiknas No. 230/C/KEP/MN/2003 pada tanggal 2 juni 2003, kemudian disusul dengan Mu'adalah dengan Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 2008 dengan Surat Keputusan tertanggal 31 Maret 2008, serta surat perpanjangan mu'adalah dari Dirjenbinbaga Islam Departemen Agama nomor : DJ.I/286/2009, dapat mengirimkan alumninya ke PTN/PTS di Indonesia maupun luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari data kelulusan dan studi lanjut santri berikut ini:

Tabel 4.5 Data Kelulusan dan Studi Lanjut Santri

NO	TAHUN	KELULUSAN			STUDI LANJUT				
		LLS	HER	JML	PTN	PTS	PTLN	MTK	JML
1	2003 / 2004	48	0	48	19	15	1	13	48
2	2004 / 2005	44	2	46	23	13	1	9	46
3	2005 / 2006	49	3	52	13	18	1	20	52
4	2006 / 2007	53	3	56	10	35	-	11	56
5	2007 / 2008	68	4	72	19	25	-	18	72

Sumber : Arsip TU PP. Ta'mirul Islam 2003 - 2009

Keterangan:

LLS: Lulus, HER: Ujian susulan / ulang, JML : Jumlah, PT : Perguruan Tinggi Negeri, PTS : Perguruan Tinggi Swasta, PTLN : Perguruan Tinggi Luar Negeri, MTK : Menikah / Tidak di ketahui / Bekerja

Dengan melihat data diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan diakuinya ijazah dari pondok pesantren, para alumnus dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi bersaing dengan siswa-siswa dari luar pesantren. Baik perguruan tinggi negeri, swasta maupun ke luar negeri.

2. Masyarakat

Pengaruh akreditasi terhadap masyarakat, yang telah dilakukan pada tahun 2003 terhadap pondok pesantren Ta'mirul Islam pada awalnya adalah adanya ketidakpercayaan mereka terhadap pihak pondok. Hal ini dikarenakan pada tahun 2003 sedang gencar-gencarnya program Ujian Nasional di jalankan oleh pemerintah.

Seiring dengan perjalanan waktu dan kiprah alumni dalam masyarakat, baik dengan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi maupun dalam bidang dakwah. Pandangan masyarakatpun berubah, dari yang tadinya was-was, ketidakpercayaan dan lain sebagainya berbalik menjadi percaya kepada pendidikan yang ada di pondok.

Pandangan masyarakat ini dapat dilihat dari jumlah santri pendaftar baru yang terus meningkat dari tahun ketahun, sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.6 Daftar Jumlah Santri Baru
Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta

KEADAAN SISWA	TAHUN PELAJARAN	KELAS		
		1	1 Tks	Jumlah
Jumlah Siswa	2004 / 2005	104	30	134
	2005 / 2006	109	34	143
	2006 / 2007	120	35	155
	2007 / 2008	130	26	156
	2008 / 2009	145	35	180

Sumber: Arsip TU PP. Ta'mirul Islam 2004-2009

C. Analisis Akreditasi Pondok Pesantren dan Kebijakan Pemerintah

Di Era Reformasi sekarang ini pesantren muncul sebagai suatu lembaga yang kelengkapan fasilitas dan manajemennya begitu memadai. Sehingga potensi santri yang ada, tidak hanya dibangun dari segi akhlak, nilai, intelek dan spiritualnya saja tetapi juga dari segi fisik dan materialnya juga terbangun.

Hal ini diwujudkan dengan fasilitas asrama, gedung madrasah, masjid, laboratorium bahasa, laboratorium computer dan internet, laboratorium IPA, bengkel santri dan lain sebagainya yang tertata dengan baik.

Dengan fasilitas yang terdapat di pesantren ternyata menjadikan masyarakat lebih tertarik untuk menyekolahkan putra-putrinya. Mereka merasa lebih tenang, karena disamping menerima bekal ilmu agama, pesantren juga membekali santrinya dengan ilmu duniawi sebagai bekal hidup di dunia maupun di akhirat.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dan No. 14 tahun 2005 tentang Sisdiknas, UU No. 14/2005 tentang guru dan

dosen, PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP No. 55/2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, Pesantren dan pendidikan Diniyah telah diakui sebagai bagian integral dari system pendidikan nasional.

Sebuah perhatian dan pengakuan yang sudah selayaknya diterima komunitas pesantren. Karena bagaimanapun bentuknya, pendidikan keagamaan dan pesantren merupakan khazanah budaya Indonesia yang memainkan peran penting dalam proses perubahan sosial sejak awal munculnya lembaga ini terhadap system pendidikan nasional.

Implementasi dari itu semua, sejak era reformasi telah dilakukan akreditasi/penyetaraan/mu'adalah oleh pemerintah RI, baik melalui Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional terhadap beberapa pesantren di Indonesia.

Akreditasi tersebut memberikan peluang, perlakuan dan pengakuan yang sama terhadap ijazah / sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh pesantren mu'adalah. Para alumni pesantren mu'adalah mempunyai hak yang sama dengan alumni sekolah umum untuk dapat terus berkiperah di dunia pendidikan (studi di Perguruan Tinggi Agama dan Umum), dunia kerja dan masyarakat. Mereka tidak akan terhalang hanya karena yang bersangkutan tidak pernah mengenyam pendidikan umum atau memiliki ijazah pendidikan formal dengan mengikuti UN/UNAS (Ujian Nasional).²⁰

²⁰ SK Dirjen Binbaga Islam, No: E.IV/PP.03.2/KEP/64/98, SK Mendiknas No: 105-106/0/2000, SK Mendiknas No: 096/0/2002, SK. Mendiknas No: 240/C/KEP/MN/2003, SK Mendiknas No: 25/C/Kep/MN/2005 tentang penyetaraan KMI/TMI pondok pesantren dengan SMA/MA.

1. Faktor Pendukung

UU. No: 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan peluang emas bagi pengembangan pesantren. Undang-undang tersebut menghapus diskriminasi terhadap pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini dengan diakui sebagai bentuk pendidikan keagamaan (pasal 30 ayat 4).

Beberapa kalangan meyakini nasib lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia itu akan menjadi lebih baik. Kecenderungan aparat birokrasi pendidikan meminggirkan pesantren dari arus utama kebijakan selama ini tidak sah lagi diteruskan. Dukungan kebijakan dan pendanaan untuk pendidikan diniyah dan pesantren pun diyakini akan lebih besar daripada sebelumnya.

Para alumni pendidikan diniyah dan pesantren akan mendapat perlakuan dan pengakuan yang sama dengan alumni pendidikan umum. Kesenambungan pendidikan dan kiprah kemasyarakatan alumni pesantren tidak akan terhalang hanya karena yang bersangkutan tidak pernah mengenyam pendidikan umum atau memiliki ijazah "pendidikan formal".

2. Faktor Penghambat

Konsekuensi dari hal-hal yang menggembirakan tersebut, kedua institusi pendidikan keagamaan ini akan terikat dengan berbagai regulasi teknis dan ketentuan administratif. Dan, inilah harga yang harus dibayar kalangan pesantren untuk mendapatkan kesetaraan perlakuan dan pengakuan tersebut.

Terlepas dari berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah, peraturan ini menyimpan sedikitnya tiga ranjau yang menjadi dilema dan mengancam eksistensi, karakter, dan kekhasan pesantren dalam jangka panjang.

- a. Bahwa pesantren sejak awal harus mewaspadai kecenderungan timpangnya eksekusi kewenangan pemerintah dibanding pemenuhan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kasus reduksi pemenuhan kewajiban pemerintah atas pembiayaan pendidikan dasar yang di-"make up" dengan istilah "bantuan" dalam program bantuan operasional sekolah (BOS) adalah indikasi nyata kuatnya kecenderungan itu. Contoh aktual ialah implementasi UU No: 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang carut marut belakangan ini.
- b. Adanya upaya homogenisasi-hegemonik dan birokratisasi pesantren dan pendidikan diniyah melalui instrumen evaluasi dan akreditasi.

Sebagaimana diatur dalam pasal 12 PP. No: 55/2007, pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) setelah memperoleh pertimbangan dari menteri agama. Sementara itu, pelaksanaan ujian nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (pasal 19).

Apabila kita baca sekilas, tidak ada yang janggal dalam ketentuan ini. Tetapi, jika kita cermati ruang lingkup SNP dalam PP. No: 19/2005, kejanggalan itu akan tampak. Pasalnya, SNP meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (pasal 2 ayat 1).

Implementasi dari peraturan ini adalah pemerintah perlu membentuk lembaga sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan atau lembaga penjaminan mutu. Jika Departemen Pendidikan Nasional mengatur lembaga sertifikasi guru, Departemen Agama dalam waktu dekat akan mengatur lembaga sertifikasi Kyai.

c. Intervensi kurikulum.

Dalam PP. NO. 55/2007 dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan diniyah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam untuk diniyah dasar serta ditambah pendidikan seni dan budaya untuk diniyah menengah (pasal 18):

Dibanding draf awal rancangan Peraturan Pemerintah ini yang disusun pada 2003, ketentuan di atas jauh lebih longgar. Sebelumnya, ketentuan kurikulum pendidikan diniyah mencantumkan lebih dari 10 mata pelajaran yang wajib diajarkan. Meski demikian, tidak ada jaminan jumlah mata pelajaran tersebut tidak akan ditambah seiring dengan implementasinya di kemudian hari.

Pasalnya, meski dihapus dari Peraturan Pemerintah, pengaturan isi kurikulum pendidikan keagamaan justru dialihkan pada Peraturan Menteri Agama dengan merujuk SNP. Jika demikian halnya, nasib diniyah dapat dipastikan segera menyusul nasib madrasah (ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah) yang awalnya hanya diwajibkan memiliki muatan pendidikan umum sekitar 30 %.

Pengaturan kurikulum yang terdapat di dalam PP. No. 55/2007 juga mengindikasikan adanya penyeragaman materi pendidikan agama di pondok pesantren dan diniyah, padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa materi pelajaran keagamaan yang ada di setiap pesantren akan berbeda dengan pesantren lainnya.

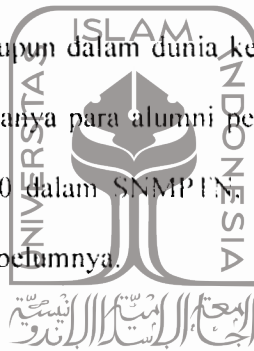
Maka dikhawatirkan berbagai prosedur teknis-administratif yang disyaratkan dalam peraturan ini akan menyeret pendidikan diniyah dan pesantren ke dalam pusaran birokratisasi yang melelahkan. Dalam kondisi tersebut, peran pesantren dengan lembaga pendidikan diniyah di dalamnya akan tereduksi sebagai lembaga pendidikan semata.

Padahal, dalam sejarah panjangnya, peran pesantren telah melingkupi enam ranah penting sekaligus. Yaitu, sebagai lembaga pendidikan, lembaga keilmuan, lembaga pelatihan, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga bimbingan keagamaan, dan simpul budaya.

d. Kecemburuan sosial

Akreditasi pesantren dengan penyetaraan ijazahnya memberikan kecemburuan social bagi kalangan yang berada di luar pesantren. Mereka mempertanyakan dasar hukum dari pembebasan UN/UNAS bagi pendidikan pesantren.

Sikap tersebut mereka wujudkan dengan mendekati pihak-pihak tertentu untuk tidak menerima ijazah dari pesantren dalam penerimaan mahasiswa baru maupun dalam dunia kerja. Wujud dari hal itu semua adalah tidak diterimanya para alumni pesantren mu'adalah pada tahun akademik 2009/2010 dalam SNMPTN padahal mereka bisa diterima pada tahun-tahun sebelumnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian akreditasi pesantren dengan studi kasus pada Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta, penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan, bahwa:

Akreditasi pondok pesantren menitik beratkan pada 8 komponen, yakni administrasi/manajemen, organisasi/kelembagaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, peserta didik/santri, proses pembelajaran, lingkungan/kultur pondok pesantren, serta produk pondok pesantren.

Proses akreditasi pondok pesantren meliputi beberapa tahap sebagai berikut: pengajuan permohonan akreditasi (tahap pertama), penentuan tim akreditasi (tahap kedua), penentuan responden (tahap ketiga), pengumpulan data (tahap keempat), pengolahan data (tahap kelima), verifikasi data (tahap keenam), pengambilan kesimpulan (tahap ketujuh), penyusunan laporan (tahap kedelapan).

Pengaruh akreditasi terhadap Pondok Pesantren Ta'mirul Islam secara internal dapat dilihat dari terus bertambahnya santri yang menuntut ilmu dari tahun ketahun, tenaga pendidik yang memadai sesuai dengan keilmuan yang dimiliki, kurikulum terpadu antara kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Pondok Pesantren, sarana dan prasarana yang memadai dan terus berkembang, administrasi yang baik dan selalu di tingkatkan, serta penguatan dalam kelembagaan.

Sedangkan secara eksternal, akreditasi memberikan pengaruh terhadap semakin siapnya alumni Pondok Pesantren Ta'mirul Islam untuk terjun ke masyarakat dengan standar kelulusan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, program pengabdian pada masyarakat selama satu tahun setelah lulus, serta di terimanya alumni untuk dapat melanjutkan studinya di perguruan tinggi negeri maupun swasta di dalam negeri maupun di luar negeri.

B. Saran-saran

Dengan melihat kesimpulan yang di paparkan diatas, penulis berusaha memberikan saran-saran guna kemajuan Program Akreditasi Pondok Pesantren pada tahun-tahun selanjutnya, sebagai berikut:

1. Program Akreditasi Pondok Pesantren yang telah dilakukan oleh pemerintah hendaknya dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya. Hal ini karena berdasarkan fakta yang ada selama ini bahwa pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia merupakan soko guru pendidikan nasional yang telah mengabdikan diri untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sejak Indonesia belum merdeka. Dan untuk meneruskan eksistensi pondok-pondok pesantren tersebut diperlukan kebijakan khusus dari pemerintah, yakni dengan mengakreditasi pondok-pondok pesantren lainnya, tidak hanya sebatas kebijakan menteri yang berkuasa dalam kabinet.
2. Program Akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Pondok Pesantren hendaknya mempunyai landasan hukum dan tujuan yang jelas. Dibuktikan dengan tidak adanya standar akreditasi yang baku dan tertulis

terhadap akreditasi pondok pesantren sebagaimana pedoman akreditasi terhadap sekolah dan madrasah formal yang ada.

3. Bahwa program Akreditasi Pondok Pesantren disinyalir mempunyai kecenderungan adanya ketimpangan eksekusi kewenangan pemerintah dibanding pemenuhan kewajiban dan tanggung jawabnya, adanya upaya homogenisasi-hegemonik dan birokratisasi pesantren dan pendidikan diniyah melalui instrumen evaluasi dan akreditasi, serta intervensi kurikulum. Maka dikhawatirkan berbagai prosedur teknis-administratif yang disyaratkan dalam peraturan ini akan menyeret pendidikan diniyah dan pesantren ke dalam pusaran birokratisasi yang melelahkan. Yang dalam kondisi tersebut, peran pesantren dengan lembaga pendidikan diniyah di dalamnya akan tereduksi sebagai lembaga pendidikan semata. Padahal, dalam sejarah panjangnya, peran pesantren telah melingkupi enam ranah penting sekaligus. Yaitu, sebagai lembaga pendidikan, lembaga keilmuan, lembaga pelatihan, lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga bimbingan keagamaan, dan simpul budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Hery Noer, Drs, MA, Munzier, Drs, SH. 2000. *Watak Pendidikan Islam*. Jakarta: Friska Agung Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. X. Yogyakarta: Roneka Cipta.
- Arsif Laporan KMI Pondok Pesantren Ta'mirul Islam ke Kanwil Depag Prop. Jawa-Tengah bulan Maret 2008. Tidak dipublikasikan.
- Atsip Panitia Ujian Santri Akhir KMI Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta 2009. tidak dipublikasikan
- Atsip Sekretaris Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta 2009, tidak dipublikasikan
- Azhari, Muntaha dan Abdul Mun'im. 1989. *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M.
- Depag RI, 2007. *Pedoman Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru di Pesantren Mu'adalah dalam Jabatan*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam
- Depag RI. 2004. *Pedoman Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tahun 2004-2009*. Jakarta: Dirjen P.K. Pontren dan Bagais RI
- Depag RI. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dirjen Pendis Depag RI: Jakarta.
- Dhofier, Zamakhsary. 1984. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.

Dirjen Dikdasmen Depdiknas, Pedoman Penyetaraan Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah setara dengan SMU, tidak dipublikasikan

Dirjen Pendidikan Islam. 2007. *Pedoman Program Beasiswa Santri Beprestasi Departemen Agama RI*. Tnkp: Tnp

Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

<http://www.gontor.co.id>. Di akses pada tanggal 3 Mei 2009 pukul 10.23.

Khusnurdilo, Moh. Drs, M.Pd, Mashudi, Sulthon Muhammad, Drs, MPd. 2005. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.

Mardalis. 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Masyhud, M. Sulthon dkk. 2005. *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka.

Muhadjir, Noeng. 1985. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Bina Ilmu.

Mukhtar, Maksum. 2001. *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Mukhtar, Maksum. 2003. *Pola Pembelajaran di Pesantren*, (Jakarta: Dirjenbinbagais.

Munawir. Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Nana Syaodih Sukmadinata, Prof. DR. 1997. *Pengembangan Kurikulum – Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nawawi, Hadari. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Panitia Sertifikasi Guru dalam Jabatan Pesantren Mu'adalah. 2007. *Panduan Pelaksanaan Sosialisasi, Pemetaan dan Pendataan Sertifikasi Guru Pesantren Mu'adalah*. Ttp: tnp.
- Pondok Modern Gontor. 2006. *Warta Dunia, Suplemen 80 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor*. Ponorogo: Darussalam Press.
- Rachman Shaleh, Abdul. 2000. *Pendidikan Agama dan Keagamaan; Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa.
- Sanaki, Hujair Ah. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Materi XIII (Materi Kuliah dalam Bentuk Handout)*. Tnp: Tnp.
- Sekretariat Pondok Pesantren Ta'mirul Islam. 2007. *Buku Pegangan Ustadz/Ustadzah Kulliyatul Mu'abim Al-Islamiyyah Pondok Pesantren Ta'mirul Islam*. Tidak dipublikasikan.
- SK Dirjen Binbaga Islam, No: E.IV/PP.03.2/KEP/64/98, SK Mendiknas No: 105-106/0/2000, SK Mendiknas No: 096/0/2002, SK Mendiknas No: 240/C/KEP/MN/2003, SK Mendiknas No: 25/C/Kep/MN/2005 tentang penyetaraan KMI/TMI pondok pesantren dengan SMA/MA.
- Steenbrink, Karel A. 1986. *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: LP3ES.
- Syukri Zarkasyi, Abdullah. 2005. *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim LP3ES. 1975. *Profil Pesantren*. Jakarta: LP3ES.

Yacub, Muhammad. 1993. *Pondok Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Angkasa.

Zarkasyi, Imam. 1994. *Pekan Perkenalan*. Gontor: Darussalam Press.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

RIWAYAT HIDUP

- a. Nama Lengkap : SUWARDI, S.Ag
- b. Tempat dan Tanggal Lahir: Kemelak, 28 Desember 1974
- c. Profesi : Guru
- d. Jabatan : Kepala MTs. Ta'mirul Islam Surakarta
- e. Alamat Instansi : Jln. KIP. Samudhuri No. 3 Tegalsari Surakarta
- f. Alamat Rumah : Pegiling RT. 1/1 No. 1 Pengkol Nguter Sukoharjo
Jawa - Tengah
- g. Riwayat Pendidikan : - SDN Kemelak (1980 – 1987)
- SMP N2 Bujuraja (1987 – 1990)
- MA. Ta'mirul Islam (1990 – 1993)
- DI Politek Gajahmada Yogya (1998 – 1999)
- IKMTA Jombang (1994 – 1998)
- h. Riwayat Pekerjaan : - Guru MDA Al-Hadi Kra (1993 – 1994)
- Guru MTs. Ta'mirul Islam (1999 – sekarang)
- i. Karya Ilmiah : - Sejarah Kebudayaan Islam MTs. VIII
- Sejarah Kebudayaan Islam MTs. IX

Surakarta, Juli 2009

SUWARDI

Lampiran 1

INTERVIEW GUIDE SEJARAH DAN MANAJEMEN PONDOK PESANTREN TA'MIRUL ISLAM SURAKARTA

A. Adminstrasi / Manajemen

1. Apakah pondok pesantren memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas?
2. Apakah pondok pesantren memiliki program kerja semester dan tahunan?
3. Siapakah yang menyiapkan program kerja?
4. Apakah anda mengetahui dan memahami visi, misi, tujuan, dan program kerja pondok pesantren?
5. Apakah aktifitas pondok pesantren berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan program kerja pondok pesantren?
6. Seberapa sering pimpinan pondok pesantren dapat melaksanakan fungsi control terhadap pelaksanaan program kerja pondok pesantren?
7. Bagaimana pemisahan hak atas harta bergerak dan harta tidak bergerak antara pondok pesantren, keluarga pimpinan pondok pesantren dan ustadz?
8. Apakah pembukuan administrasi dan pendokumentasian arsip-arsip ditangani dengan benar dan rapi?
9. Apakah pondok pesantren memiliki sumber dana yang menjamin kelangsungan operasional pendidikan dan pengajaran?
10. Bagaimana pengelolaan sumber dana dilaksanakan?
11. Bagaimana pengelolaan unit usaha pondok pesantren dan untuk siapa hasilnya?

B. Organisasi / Kelembagaan

1. Bagaimana keberadaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART)?
2. Apakah pondok pesantren memiliki struktur organisasi dan disertai pembagian/rincian kerja yang tegas?

3. Apakah struktur organisasi dan pembagian/rincian kerja dikenakan kepada warga pondok pesantren serta di pahami?
4. Apakah personalia pondok pesantren menjalankan aktivitas/tugas sesuai dengan wewenangnya?
5. Apakah pembagian tugas dan wewenang antara badan wakaf / yayasan dan pondok pesantren diatur oleh suatu aturan dan sangat tegas?
6. Apakah pondok pesantren memiliki badan hukum yang resmi?
7. Kurikulum apakah yang diterapkan di pondok pesantren?
8. Seberapa banyakkah pondok pesantren menyelenggarakan kegiatan ko-kurikuler untuk mengembangkan dan menyalurkan bakat dan minat santri seperti latihan pidato, khutbah, imamah, diskusi, seminar, sarasehan atau cerdas cermat?
9. Seberapa banyak pondok pesantren menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan dan menyalurkan bakat dan minat santri seperti olahraga, kesenian, ketrampilan atau pramuka?
10. Apakah peraturan/tata tertib yang jelas bagi ustadz, karyawan, dan santri tersedia?

C. Sarana & Prasarana

1. Bagaimana status lahan/tanah yang ditempati pondok pesantren?
2. Tersedia kan lapangan olahraga di pondok pesantren?
3. Bagaimanakah keadaan alat olahraga yang dimiliki pondok pesantren?
4. Bagaimana ketersediaan ruang kerja beserta perabot untuk pimpinan pondok pesantren, rdirektur/kepala madrasah, dewan ustadz, pengasuhan, tenaga administrasi, karyawan?
5. Berapa jumlah ruang laboratorium sains beserta kondisi perabotnya?
6. Bagaimana keadaan alat laboratorium sains dan bahan kimia yang dimiliki?
7. Bagaimana luas ruang perpustakaan beserta kondisi perabotnya?
8. Bagaimana keadaan jenis buku mata pelajaran di perpustakaan yang dimiliki pondok pesantren?

9. Berapa jumlah ruang belajar santri yang ada?
10. Bagaimana ketersediaan ruang klinik / UKS beserta kondisi perabotnya?
11. Bagaimanakah ketersediaan tempat ibadah?
12. Apakah pondok pesantren mempunyai kantin/ruang makan?
13. Apakah pondok pesantren memiliki ruang aula / serba guna?
14. Apakah pondok pesantren memiliki ruang kerja pengurus organisasi santri beserta perabot yang memadai?
15. Berapa jumlah toilet dan kamar mandi untuk ustadz dan santri?
16. Bagaimanakah keadaan peralatan kesenian yang dimiliki pondok pesantren?
17. Bagaimanakah keadaan perlengkapan kantor yang dimiliki pondok pesantren?
18. Apakah pondok pesantren memiliki peralatan multimedia dan bagaimanakah kondisinya?
19. Sejauh manakah pondok pesantren memanfaatkan bangunan dan perabot sesuai fungsinya?
20. Bagaimana kondisi halaman dan lingkungan di sekitar pondok pesantren?
21. Sejauh mana bangunan dan perabot dirawat keutuhannya sehingga terhindar dari kerusakan?

D. Ketenagaan (Ustadz dan Karyawan)

1. Berapa jumlah ustadz yang ada?
2. Berapa jumlah wali kelas atau petugas pengasuhan yang tersedia?
3. Berapa jumlah ustadz yang berkualitas S1 atau minimum telah mengajar selama 4 tahun?
4. Bagaimana kepala sekolah/direktur meningkatkan kualifikasi dan keahlian ustadz?
5. Bagaimana sikap pondok pesantren bila terdapat santri atau ustadz yang menonjol?

E. Peserta Didik / Santri

1. Bagaimana animo masyarakat masuk pesantren selama 5 tahun terakhir?
2. Untuk program belajar 6 tahun, apakah setiap jenjang kelas ada santrinya?
3. Berapakah jumlah santri pada setiap rombongan belajar?
4. Bagaimana sikap pondok pesantren terhadap santri yang melanggar tata tertib?
5. Berapa persen rata-rata ketepatan waktu hadir santri tiap hari?
6. Bagaimana pengurus organisasi santri di bentuk dan dig anti?
7. Bagaimana program kerja santri di usun?

F. Proses KBM

1. Apakah pondok pesantren memiliki kalender akademik?
2. Apakah ustadz menjabarkan kurikulum menjadi program kerja tahunan, semester, satuan pelajaran dan rencana pelajaran?
3. Bagaimana pendekatan proses pembelajaran yang digunakan ustadz?
4. Metode belajar apa sajakah yang di gunakan ustadz dalam KBM?
5. Sejauh mana ustadz memanfaatkan multimedia dalam proses pembelajaran?
6. Sejauhmana ustadz mendorong santri memanfaatkan berbagai sumber informasi sebagai sumber belajar?
7. Bagaimana ustadz menilai, membahas, dan menindaklanjuti hasil pekerjaan atau hasil tes santri?
8. Apakah kinerja ustadz di supervise dan di evaluasi oleh direktur/kepala madrasah?

G. Lingkungan / Kultur Pondok Pesantren

1. Bagaimana hubungan antara lembaga pondok pesantren dan masyarakat?
2. Bagaimana hubungan antara lembaga pondok pesantren dan yayasan?

H. Produk Pondok Pesantren

1. Berapa rata-rata nilai ujian akhir setiap mata pelajaran yang dicapai santri selama lima tahun terakhir?

2. Bagaimana ketrampilan yang dimiliki santri untuk melakukan kegiatan percobaan di laboratorium sains dan computer?
3. Berapa prosentase rata-rata angka santri yang lulus selama lima tahun terakhir?
4. Bagaimana kecendrungan jumlah tamatan pondok pesantren yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi selama lima tahun terakhir?
5. Bagaimana perilaku tamatan pondok pesantren?
6. Berapa angka rata-rata santri bermasalah selama lima tahun terakhir yang berubah perilaku menjadi baik?
7. Bagaimana kemampuan tamatan pondok pesantren dalam berbahasa Arab dan Inggris?



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 2

INTERVIEW GUIDE
AKREDITASI PONDOK PESANTREN
TA'MIRUL ISLAM SURAKARTA

1. Apa yang melatar belakangi pondok pesantren ikut melakukan akreditasi?
2. Apa landasan/dasar dari akreditasi pondok pesantren
3. Tujuan dan sasaran apakah yang akan dituju dengan program akreditasi pondok pesantren?
4. Bagaimana pelaksanaan dan proses akreditasi pondok pesantren?
5. Apa sajakah komponen dan instrument akreditasi pondok pesantren?
6. Bagaimana penetapan status dan SK akreditasi pondok pesantren?
7. Berapa jumlah pondok pesantren yang telah di akreditasi?
8. Kapan pondok pesantren Ta'mirul Islam mengajukan dan di akreditasi?
9. Bagaimana pengaruh internal akreditasi pondok pesantren Ta'mirul Islam terhadap:
 - a. Peserta didik / santri dan wali santri
 - b. Tenaga pendidik /Ustadz
 - c. Kukikulum
 - d. Sarana dan prasarana
 - e. Administrasi
 - f. Kelembagaan
10. Bagaimana pengaruh eksternal akreditasi pondok pesantren Ta'mirul Islam terhadap alumni dan masyarakat?
11. Apa kelebihan dan kekurangan dari program kareditasi pondok pesantren?

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Nomor : 240/C/KEP/MN/2003

TENTANG

PENGAKUAN KULLIYATUL/TARBIYATUL MUALLIMIN
AL-ISLAMIYAH (KMI/TMI) PONDOK PESANTREN
SETARA DENGAN SEKOLAH MENENGAH UMUM

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. Bahwa Kulliyatul/Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (KMI/TMI) Pondok Pesantren yang tersebut dalam lampiran keputusan ini telah menyelenggarakan pendidikan 6 (enam) tahun sesudah SD/MI;
 - b. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Tim Penyetaraan Mutu Kulliyatul/Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah dengan Tamatan Sekolah Menengah Umum yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Kulliyatul/Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (KMI/TMI) Pondok Pesantren yang tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diakui setara dengan sekolah menengah umum (SMU);
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu memberikan pengakuan terhadap Kulliyatul/Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (KMI/TMI) Pondok Pesantren yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, setara dengan sekolah menengah umum (SMU);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M/2001, mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi pengakuan terhadap Kulliyatul/Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (KMI/TMI) Pondok Pesantren yang tersebut dalam lampiran keputusan ini setara dengan sekolah menengah umum (SMU).
- KEDUA** : Tamatan Kulliyatul/Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (KMI/TMI) yang tersebut dalam lampiran keputusan ini diakui setara dengan tamatan SMU.
- KETIGA** : Keputusan ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan sistem pendidikan nasional.
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 20 Juni 2003

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah

TTD.

Dr. Ir. Indra Djati Sidi
NIP 130 672 115

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Dasar dan Menengah, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Gubernur setempat,
7. Bupati/Walikota setempat,
8. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
9. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
11. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
12. Pimpinan Pondok Modern Al-Barokah Patanjaro, Nganjuk Jawa Timur,
13. Komisi VI DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Perundang-undangan
Bagian Tataaksana, Humas dan
Kerjasama, Set Ditjen Dikdasmen,



DIREKTORAT
JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA
Dede Subagio, SH
NIP. 130892763

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 Nomor : 240/C/KEP/MN/2003

**DAFTAR KULLIYATUL/TARBIYATUL MUALLIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI/TMI)
 YANG MEMENUHI SYARAT PENYETARAAN**

NO	NAMA	LOKASI
1	Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Darunnajah	Jl. Ulujami Raya No.86, Pesanggrahan Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12250, Telp: (021)7350187
2	Ma'hadul Mu'allimien Al-Islamie (MMI) Pondok Pesantren Mathabul Ulum	Jl. Raya Jambu, Kecamatan Lenteng, Sumenep, Jawa Timur, Telp: (0328) 664688
3	Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Pesantren Ta'mirul Islam	Jl. KH. Samanhudi No.3, Tegalsari, Surakarta, Jawa Tengah PO BOX 441, Telp: (0271) 741310-714266
4	Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Modern Al-Mizan	Jl. Jenderal Sudirman KM 3, Ancol, Narimbang, Rangkas Bitur Lebak, Banten 42315, Telp: (0252) 206460
5	Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Al-Basyariyah	Jl. Cibaduyut No.9 Kampus Cigondewah, Patrol Sari Arjasari Banjaran, Bandung Jawa Barat, Telp: (022) 5415424-5415061
6	Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlash	Desa Ciawilor, Ciawigebang, Kuningan, Jawa Barat 45591 Telp: (0232) 878462

UNIVERSITAS
 ISLAM
 INDONESIA

Jakarta, 20 Juni 2003

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
 Direktur Jenderal
 Pendidikan Dasar dan Menengah

Dr. Ir. Indra Djati Sidi
 NIP 130 672 115

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan
 Bagian Tatalaksana, Humas dan
 Kerjasama, Set Ditjen Dikdasmen,

Dejos Subagjo, SH
 NIP 130892763





Lampiran 5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 5, Senayan Jakarta
Telp. 5725612, 5725061 Pesawat 5513-5515-5516-5518
Faksimili (021) 5725612

13

Nomor : 2414/C/MN/2004
Lampiran :
Hal : Pengakuan KMI/TMI/MMI

20 April 2004

Yang terhormat
Rektor Perguruan Tinggi
Seluruh Indonesia

Dengan hormat kami beritahukan bahwa sejak tahun 2002 telah diterbitkan pengakuan terhadap beberapa Kulliyatul/Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiah KMI/TMI/MMI Pondok Pesantren setara Sekolah Menengah Atas dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

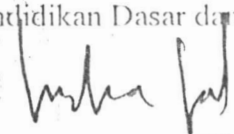
Berkenaan dengan hal tersebut ijazah yang dikeluarkan oleh KMI/TMI/MMI yang telah diakui tersebut dapat digunakan untuk mengikuti ujian masuk Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta tanpa harus mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN).

Adapun daftar nama-nama KMI/TMI/MMI yang telah diakui setara dengan SMA adalah:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pondok Pesantren Gontor | Ponorogo |
| 2. Pondok Pesantren Al-Amien Preduan | Sumenep |
| 3. Pondok Pesantren Modern Al-Barokah Jombang | Nganjuk |
| 4. Pondok Pesantren Darunnajah | Jakarta Selatan |
| 5. Pondok Pesantren Mathabul Ujun | Sumenep |
| 6. Pondok Pesantren Ta'mirul Islam | Surakarta |
| 7. Pondok Pesantren Modern Al-Mizan | Lebak |
| 8. Pondok Pesantren Al-Basyariyah | Bandung |
| 9. Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlash | Kuningan |

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,


Dr. Ir/Indra Djati Sidi
NIP 130672115

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sesjen Depdiknas;
3. Kepala Dinas Pendidikan di Propinsi;
4. Pimpinan Pondok.



Lampiran 6 **DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
 Jl. Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5, Senayan Jakarta 10270
 Telepon : 5725061, 5725610, 5725612, 5725613

Nomor : 2282/C.C4/MN/2005
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Status Tamatan KMI/TMI Pondok Pesantren

3 Mei 2005

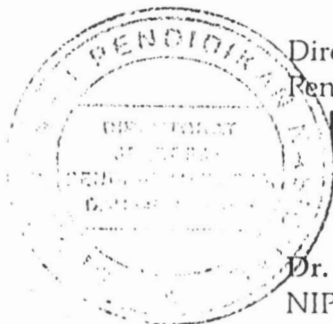
Th. : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Kompleks Depdiknas Senayan
 Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan
 Jakarta Pusat

Dengan hormat kami beritahukan bahwa Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Pondok Pesantren Gontor Pongorogo telah bekerjasama melakukan penilaian atas keberadaan Kulliyatul/Tarbiyatul Mu'amin Al-Islamiah (KMI/TMI) yang dikelola secara mandiri oleh Pondok Pesantren. Pengelolaan secara mandiri dimaksud diantaranya berkenaan dengan penentuan kurikulum, proses pembelajaran, proses penilaian, dsb. Dari jumlah KMI/TMI yang dinilai telah ditetapkan 17 (tujuh belas) KMI/TMI yang matannya disetarakan dengan tamatan SMA sebagaimana daftar terlampir.

Dengan demikian, maka tamatan KMI/TMI tersebut di atas memiliki status, hak dan penghargaan yang sama dengan tamatan SMA, seperti melanjutkan pendidikan, menjadi pegawai pemerintah maupun swasta, dsb.

Selain keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang penyetaraan KMI/TMI telah kami sampaikan selain kepada Pimpinan Pondok Pesantren yang bersangkutan, juga kepada instansi yang relevan. Dalam rangka menjamin hak tamatan KMI/TMI dalam penerimaan calon mahasiswa dan calon taruna baru, kami minta perkenan Saudara untuk menyebarkan hasil penyetaraan KMI/TMI beserta status tamatannya kepada semua perguruan tinggi dan instansi lain yang relevan.

Sebagai perhatian dan perkenan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal
 Pendidikan Dasar dan Menengah,

Indra Djati Sidi
 Dr. Indra Djati Sidi *Di*
 NIP. 130672115

Sebaran :

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 Menteri Pendidikan Nasional;
 Menteri Agama.

**DAFTAR KULLIYATUL / TARBIYATUL MUALLIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI/TMI)
YANG TAMATANNYA DISETARAKAN DENGAN TAMATAN SMA**

NAMA PONDOK PESANTREN KMI/TMI	ALAMAT	KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo	Ponorogo, Jawa Timur	Nomor 105/0/2000 Tanggal 29 Juni 2000
Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan	Sumenep, Madura, Jawa Timur	Nomor 106/0/2000 Tanggal 29 Juni 2000
Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Al-Barokah Patianrowo	Nganjuk, Jawa Timur	Nomor 096/0/2002 Tanggal 19 Juni 2002
Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Darunnajah, Pesanggrahan	Jl. Ulujami Raya No. 86 Pesanggrahan Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12250 Telp. (021) 7350187	Nomor 240/C/KEP/MN/2003 Tanggal 20 Juni 2003
Ma'hadul Mu'allimin Al-Islamiyah (MMI) Pondok Pesantren Mathabul Ulum, Sumenep	Jalan Raya Jambi, Kecamatan Lenteng, Sumenep Jawa Timur Telp (0328) 664688	Nomor 240/C/KEP/MN/2003 Tanggal 20 Juni 2003
Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, Surakarta	Jl. KH. Samanhudi No. 3 Tegalsari, Surakarta, Jawa Tengah PO BOX 441 Telp. (0271) 741310,741266	Nomor 240/C/KEP/MN/2003 Tanggal 20 Juni 2003
Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Modern Al-Mizan	Jl. Jenderal Sudirman Km 3, Ancol, Narimbang, Rangkasbitung, Lebak, Banten 42315 Telp. (0252) 206460	Nomor 240/C/KEP/MN/2003 Tanggal 20 Juni 2003
Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Al-Basyariyah, Bandung	Jl. Cibaduyut No. 9 Kampus Cigondewah, Patrol Sari Arjasari Banjaran, Bandung, Jawa Barat, Telp. (022) 5415424, 5415061	Nomor 240/C/KEP/MN/2003 Tanggal 20 Juni 2003
Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlash Kuningan	Desa Ciawilor, Ciawi Gebong, Kuningan, Jawa Barat 45591 Telp. (0232) 878462	Nomor 240/C/KEP/MN/2003 Tanggal 20 Juni 2003
Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung, Bogor	Jl. Raya Jakarta, Bogor Km 31 PO. BOX. 25, Jabon Mekar Parung, Bogor, Jawa Barat 16330 (0251) 611884	Nomor 25/C/Kep/MN/2005 Tanggal 28 Januari 2005

NO.	NAMA PONDOK PESANTREN KMI/TMI	ALAMAT	KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
1.	Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Darunnajah Cipining, Bogor	Cipiring Jl.Argapura, Cigudeg, Jasinga PO.BOX 1 Bogor Jawa Barat 16690 (0251) 470044	Nomor 25/C/Kep/MN/2005 Tanggal 28 Januari 2005
2.	Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Darussalam Cibatu, Garut	Kp. Sindangsari, Desa Kersamanah, Kec. Kersamanah, Cibatu, Tromol Pos No. 2/CBT Garut 44185 (0262) 421588/467817/467356	Nomor 25/C/Kep/MN/2005 Tanggal 28 Januari 2005
3.	Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah, Medan	Jl. Jamin Ginting Payabungung, Simpang, Setayan, Medan Telp 061-8360135, 081779316075 081362092481 Fax. 061-8362535	Nomor 25/C/Kep/MN/2005 Tanggal 28 Januari 2005
4.	Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Pesantren Pabelan-Muntilan, Magelang - Indonesia	Pabelan, Mungkid Muntilan Magelang PO.BOX 800 Muntilan Telp. & Fax (0293) 782110 782040, 782091	Nomor 25/C/Kep/MN/2005 Tanggal 28 Januari 2005
5.	Madrasatul Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Dar Al-Qalam Gintung, Jayanti, Tangerang	Gintung, Kec. Jayanti, Tangerang, Banten (021) 5950236, 59450207	Nomor 25/C/Kep/MN/2005 Tanggal 28 Januari 2005
6.	Madrasatul Mu'allimin/Mu'allimat Al-Islamiyah (MMI/MMal) Pondok Pesantren Baitul Arqom, Baitung, Jember	Komplek Pondok Putri Baitul Arqom Jl Karang Duren No. 32 Baitung, Jember (0336) 621315	Nomor 25/C/Kep/MN/2005 Tanggal 28 Januari 2005
7.	Kulliyatul Al-Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Tanah Datar	Pincuran Tinggi Padang Panjang, Tanah Datar (0752) 83425	Nomor 25/C/Kep/MN/2005 Tanggal 28 Januari 2005



Jakarta, April 2005

Direktur Jenderal

Pendidikan Dasar dan Menengah,

Dr. Indra Djati Sidi

NIP. 130672115



سفارة جمهورية مصر العربية
في جاكرتا

التاريخ : ٢٠٠٨/٤/١٨

السيد / مدير معهد كلية المعلمين والمعلمات بمعهد التربية

تعمير الإسلام - سوراكرتا - جاوا الوسطى - اندونيسيا

تحية طيبة وبعد ،،،

فنتشرف بالأحاطة أن الأزهر الشريف قد وافق على معادلة شهادتي الأعداية و الثانوية
لمعهدكم الموقر ، بشهادتي الأعدائية والثانوية لمعهد الدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف ، وعليه
يحق للمنتهي من المرحلة الأعدائية والناجح فيها الألتحاق بالصف الأول الثانوى ، كما يحق للمنتهى
من المرحلة الثانوية والناجح فيها الألتحاق بالصف الأول الثانوى النظرية بجامعة الأزهر الشريف .

برجاء التكرم بموافاتنا بكشوف بأسماء الطلاب الناجحين في المرحلة الإعدائية والمرحلة
الثانوية كل على حده للعام الدراسي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ لموافاة الإدارة العامة للطلاب الوافدين بالأزهر
الشريف .

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

مع وافر الاحترام ،،،

السفير
محمد طه

السيد الأستاذ / مدير معهد كلية المعلمين والمعلمات بمعهد التربية
تعمير الإسلام - سوراكرتا - جاوى الوسطى - اندونيسيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

نحيط علم سيادتكم بان الأزهر قد وافق على معادلة الشهادة الإعدادية
والشهادة الثانوية لمعهد كلية المعلمين والمعلمات بمعهد التربية - تعمير الإسلام
سوراكرتا - جاوى الوسطى اندونيسيا بالشهادة الإعدادية والثانوية لمعهد
البعوث الإسلامية بالأزهر الشريف .
ويحق للمنتهى من المرحلتين الإعدادية والثانوية والنجاح فيها بالالتحاق
بالصف الأول الثانوى للنجاح فى المرحلة الإعدادية والصف الأول بإحدى الكليات
النظرية بجامعة الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية للنجاح فى المرحلة
الثانوية .



رجاء التفضل بالإحاطة بالطلاب الوافدين وكشوف بأسماء الطلاب الناجحين
فى المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية كل مرحلة على حده للعام الدراسى
٢٠٠٧/٢٠٠٨م

UNIVERSITAS
مع خالص التحية والتقدير،،،
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
ISLAM

٢٠٠٨/٣/٣١

INDONESIA

مدير عام الطلاب الوافدين

(رجب سليم على)

أفت الخنى

محرر



DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta
 Telpn 3811810 ps. 353

Nomor : DJ. I/PP.00.7/940/2008 Jakarta, 29-07- 2008
 Sifat : Penting dan segera
 Lamp : -
 Perihal : Penyetaraan Lulusan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
 Seluruh Indonesia
 di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat edaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Nomor : Dj. H.II/V/PP.007/AZ/28/04 tanggal 9 Januari 2004, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI menetapkan kebijakan terhadap lulusan pondok pesantren dan pendidikan diniyah yang meliputi pengakuan kesetaraan lulusan dan legalisasi ijazah/syahadah pondok pesantren dan pendidikan diniyah sebagai berikut :

1. Pengakuan kesetaraan terhadap lulusan pondok pesantren dan pendidikan diniyah harus melalui program-program pendidikan antara lain :
 - a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada pondok pesantren salafiyah
 - b. Pendidikan kesetaraan yang meliputi program paket A, paket B dan paket C
 - c. Pemberian status kesetaraan (*Mu'adalah*) bagi pondok pesantren dengan Madrasah Aliyah (MA) oleh Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI
 - d. Pemberian status kesetaraan (*Mu'adalah*) bagi pondok pesantren dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) oleh Mendiknas Departemen Pendidikan Nasional
 - e. Pemberian status kesetaraan (*Mu'adalah*) bagi pondok pesantren dengan lembaga pendidikan luar negeri, khususnya Timur Tengah seperti Al-Azhar Kairo, Riyadh University, Ummul Qurra, Madina University dan lain sebagainya
2. Di luar program-program di atas, legalisasi ijazah/syahadah bagi lulusan pondok pesantren dan pendidikan diniyah dapat diberikan dengan syarat dan prosedur sebagai berikut :
 - a. Lama belajar di pondok pesantren/pendidikan diniyah sekurang-kurangnya :
 1. Untuk kesetaraan SD/MI sekurang-kurangnya 6 tahun
 2. Untuk kesetaraan SMP/MTs sekurang-kurangnya 9 tahun atau 3 tahun setelah tamat SD/MI
 3. Untuk kesetaraan SMA/MA sekurang-kurangnya 12 tahun atau 6 tahun setelah tamat SD/MI, atau 3 tahun setelah tamat SMP/MTs

4. Untuk kesetaraan dengan lembaga pendidikan luar negeri, sekurang-kurangnya 12 tahun atau 6 tahun setelah tamat SD/MI dan sederajat, atau 3 tahun setelah tamat SMP/MTs dan sederajat.
- b. Memiliki ijazah/syahadah dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- c. Kitab-kitab yang dipelajari serendah-rendahnya mencakup semua bidang studi dan acuan kitab-kitabnya dan/atau yang sederajat isinya adalah sebagai berikut :
 1. Tingkat Dasar SD/MI dan yang sederajat
 - a. Al-Qur'an : Khatam 30 juz bin-nadzar dengan tajwid yg bagus
 - b. Tauhid : Aqidatul `Awwam/Ummul Barohim
 - c. Fiqih : Safinatun Naja/Sullamut Taufiq
 - d. Akhlaq : Al-Akhlaq lil Banin/Banat
 - e. Nahwu : Al-Ajrumiyyah/Nadzom al-`Imrithy
 - f. Shorof : Matn al-Bina' wa al-Asas/ al-Amtilah al-Tashrifiyah
 2. Tingkat Menengah Pertama SMP/MTs dan yang sederajat
 - a. Al-Qur'an : Hafal juz 30 al-Qur'an dengan tajwid yang bagus
 - b. Tauhid : Kisyafatun `Awwam/As-Sanusiyyah
 - c. Fiqih : Fathul Qorib/Kifayatul Akhyar
 - d. Akhlaq : Bidayatul Hidayah/Ta'lim Muta'allim
 - e. Nahwu : Mutunimma/Al-Asymawi
 - f. Shorof : Nadzom Maqsud/ Al-Kailani
 - g. Tarikh : Nurul Yaqin
 - h. Tajwid : Hidayatul Mustafid/at-Tibyan fi Hamalatil Qur'an
 3. Tingkat Menengah Atas SMA/MA dan yang sederajat
 - a. Tafsir : Al-Jalalah
 - b. Ilmu Tafsir : Mabahits fi Ulum Al-Qur'an/Al-Itqon
 - c. Hadis : Riyadus Sholihin/Dulghal Maram
 - d. Ilmu Hadis : Al-Baiquniyyah/al-Mannah al-Latief
 - e. Fiqih : Fathul Muin/I'anatut Tholibin/Muhadzdzab
 - f. Ushul Fiqh : Al-Waraqat al-Luma'/ Al-Asybah wa al-Nadzo-ir
 - g. Tauhid : Al-Husun al-Hamidiyyah/al-Milal wa al-Nihal
 - h. Nahwu : Alfiyah Ibn Malik/Syrah Ibn Aqil
 - i. Shorof : Al-Fal/ Qawaid Lughah al-Arabiyyah
 - j. Tarikh : Ismam al-Wafaq/ Tarikh Tasyri'
 - k. Balaghoh : Al-Jauhar al-Maknun
- d. Surat keterangan/legalisasi ijazah/syahadah diberikan dengan prosedur sebagai berikut :
 1. Kandepag membentuk tim pemeriksa legalisasi ijazah/syahadah pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
 2. Pesantren yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kandepag Kabupaten/Kota dengan melampirkan bukti-bukti tertulis sebagaimana pada butir a, b, dan c di atas.
 3. Kandepag dan tim yang telah dibentuk memeriksa kelengkapan bukti-bukti yang diajukan :

4. Kandepag dan tim melakukan visitasi ke pondok pesantren/lembaga pendidikan diniyah yang bersangkutan untuk memverifikasi data-data yang diajukan.
 5. Berdasarkan hasil verifikasi, Kakandepag berhak menolak atau menerima permohonan yang diajukan dengan berita acara bermeterai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
 6. Untuk permohonan yang diterima, Kakandepag mengeluarkan Surat Keterangan/Legalisasi terhadap ijazah/syahadah lulusan pondok pesantren/pendidikan diniyah bahwa ijazah/syahadah yang bersangkutan setara dengan pendidikan formal setingkat.
3. Untuk memberikan pengakuan (*recognition*) kepada seluruh pendidikan pondok pesantren/pendidikan diniyah yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, maka diinstruksikan kepada seluruh Kakanwil Propinsi Departemen Agama :
- a. Mensosialisasikan kebijakan di atas kepada semua pihak yang berkepentingan, terutama pimpinan pondok pesantren/pendidikan diniyah
 - b. Melakukan langkah-langkah strategis yang diperlukan agar lulusan pondok pesantren/pendidikan diniyah yang belum memiliki sertifikasi kesetaraan segera menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas.

Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Direktur Jenderal

**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA
NIP. 130 809 424

Tembusan :

1. Menteri Agama
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat
4. Para Rektor PTU/PTAI seluruh Indonesia
5. Para Gubernur Propinsi seluruh Indonesia
6. Para Kepala Dinas Pendidikan Propinsi seluruh Indonesia
7. Para Bupati/Walikota Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
8. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor : D.I.I./...286.../ 2009

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS MU'ADALAH (SETARA)
PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DENGAN MADRASAH ALIYAH/SMA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa merujuk SK Mendiknas No. 25/C/Kep/MN/2005 tanggal 28 Januari 2005 dan SK Dirjen Bagais No. Dt.II/PP-01.1/AZ/9/2002 tanggal 26 Nopember 2002 tentang status Mu'adalah (setara) Madrasah Aliyah/SMA selama 4 tahun pada pendidikan pondok pesantren, maka dalam rangka kontinuitas penjaminan mutu pendidikan pondok pesantren tersebut, perlu ditetapkan perpanjangan pengakuan mu'adalah (setara) Madrasah Aliyah/SMA
- b. bahwa pendidikan pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan setingkat Madrasah Aliyah/SMA dan atau yang sederajat sebagaimana pada huruf (a) telah menyelenggarakan pendidikan 3 (tiga) tahun sesudah Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Pengakuan Perpanjangan Status Mu'adalah (kesetaraan) dengan Madrasah Aliyah/SMA terhadap pondok pesantren dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI ;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI :
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
8. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah Madrasah Aliyah ;
9. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
10. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah

Memperhatikan

1. Surat Edaran (Dirjen) Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/PP.01.1/AZ/9/02 Tanggal 26 Nopember 2002 dan surat edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 410/C/MN/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah/SMA;
2. Hasil verifikasi petugas dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terhadap pondok pesantren yang telah mengajukan perpanjangan status mu'adalah pada tanggal 27-29 Maret 2009.
3. Hasil Sidang Tim Penilai Penetapan Perpanjangan Pondok Pesantren Mu'adalah pada tanggal 10 April 2009 di ruang Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERPANJANGAN PENGAKUAN STATUS MU'ADALAH (SETARA) DENGAN MADRASAH ALIYAH/SMA PADA BEBERAPA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN (TERLAMPIR)
- Pertama : Pendidikan Pondok Pesantren sebagaimana terlampir adalah pendidikan setingkat Madrasah Aliyah yang setara dengan Madrasah Aliyah/SMA.
- Kedua : Ijazah tamatan Pendidikan Pondok Pesantren sebagaimana terlampir mendapat pengakuan setara dengan ijazah Madrasah Aliyah/SMA.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Pengakuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, akan dievaluasi setelah 2 (dua) tahun dari ditetapkannya keputusan ini oleh tim evaluasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- Kelima : Apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan pada diktum pertama di atas, tidak sesuai lagi dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Mei 2009

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA

NIP. 130309424

**PERPANJANGAN MU'ADALAH PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
DENGAN MADRASAH MA/SMA MASA BERLAKU 4 TAHUN (Periode 2009-2013)**

NO	NAMA PESANTREN	TELP DAN ALAMAT	MASA BERLAKU MU'ADALAH
1.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Gontor Ponorogo Jatim	Ponorogo Jawa Timur	Periode 2009-2013
2.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren al-Amien Prenduan Sumenep Jatim	Sumenep Jawa Timur	Periode 2009-2013
3.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Modern al-Barokah Patianrowo Nganjuk Jatim	Patianrowo Nganjuk Jawa Timur	Periode 2009-2013
4.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Periode 2009-2013
5.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Mathlabul Ulum Sumenep Jawa Timur	Sumenep Jawa Timur	Periode 2009-2013
6.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta Jawa Tengah	Surakarta Jawa Tengah	Periode 2009-2013
7.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Modern al-Mizan Lebak Banten	Lebak Banten	Periode 2009-2013
8.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren al-Basyariah	Bandung Jawa Barat	Periode 2009-2013
9.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Modern al-Ikhlash Kuningan	Kabupaten Kuningan Jawa Barat	Periode 2009-2013
10.	Tarbiyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (TMI) Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor	Jl Raya Jakarta-Bogor Km 13 PO.BOX 25, Jabon Mekar Parung Bogor 16330. (0251) 611884 Jawa Barat	Periode 2009-2013
11.	Tarbiyatul Mu'allimin al-Islamiyah (TMI) Pesantren Darunnajah Cipiring Bogor	Cipiring Jl Argapura Cigudeg Jasinga PO BOX 1 Bogor 16690 (0251) 470044 Jawa Barat	Periode 2009-2013
12.	Tarbiyatul Mu'allimin al-Islamiyah (TMI) Pesantren Darussalam Cibatugur	Kp. indangsari, Ds Kersamanah Kec. Kersamanah Cibatugur Tromol Pos No. 2/CBT Garut 44185 (0262) 421588 Jawa Barat	Periode 2009-2013

13.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Raudhatul Hasanah Medan	Jl Jamin Ginting Payabungdung Simpang Selayang Medan Tlp 061- 8360135 Fax 061- 8362535 Sumatera Utara	Periode 2009-2013
14.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Daar al-Qolam Gintung Jayanti Tangerang	Gintung Kec. Jayanti Tangerang 021-5952236 Banten	Periode 2009-2013
15.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Pabelan Muntilan Magelang	Pabelan, Mungkide Muntilan Magelang PO BOX 800 Muntilan telp & Fax 0293- 782110-782040-7 Jawa Tengah	Periode 2009-2013
16.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Baitul Arqom, Balung Jember	Komplek Pondok Putri Baitul Arqom Jl. Karang Duren No 32 Balung Jember Jawa Timur 0336-621315	Periode 2009-2013
17.	Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyyah (KMI) Pesantren Nurul Ikhlas Tanah Datar	Pincuran Tinggi Padang Panjang Tanah Datar (0752) 83425 Sumatera Barat	Periode 2009-2013
18.	Madrasah Aliyah Pesantren Mathalul Falah Kajen Margoyoso Pati	Desa Kajen - Margoyoso Pati Jawa Tengah	Periode 2009-2013
19.	Madrasah Aliyah Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Darur Rahman	Jakarta Selatan DKI	Periode 2009-2013

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Mei 2009

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA
NIP. 130809424